



# LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TAHUN 2016



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS I-A  
Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah  
Pekanbaru

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT atas curahan rahmat, taufiq dan hidayah kepada kepada hambaNya sehingga pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Pekanbaru dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2016 tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutNya sampai akhir zaman.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2016 ini merupakan rekam jejak sekaligus wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2016, yang meliputi kebijakan umum peradilan, struktur organisasi dan tupoksi, keadaan perkara, pengelolaan keuangan DIPA dan Perkara, teknologi informasi yang diterapkan dalam pengelolaan administrasi dan layanan, regulasi yang diambil dalam pelaksanaan tupoksi dengan menitikberatkan pentingnya pengawasan internal dan evaluasi atas pelaksanaan tugas yang pada bagian akhir akan dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjembatani keluar dari permasalahan yang dihadapi.

Laporan ini merupakan media pemberi informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2016, dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun berikutnya.

Kami berupaya menyajikan laporan ini secara objektif, transparan dan akuntabel dengan senantiasa melakukan perbaikan, baik dalam hal data, maupun layout, tabel dan grafik agar lebih menarik, namun kami menyadari adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan. Oleh karena itu, saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Pekanbaru, 03 Januari 2017  
Ketua,

dto

**Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
NIP. 19650125.199103.1.003

## **DAFTAR ISI**

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	4
C. Renstra (Rencana Strategis)	4
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)	9
A. Standar Operasional Prosedur (SOP)	9
B. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	15
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN	18
A. Sumber Daya Manusia	18
1. Data Pegawai	18
a. Berdasarkan Pendidikan	18
b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan PNS	18
c. Berdasarkan Jenis Kelamin	19
d. Berdasarkan Tingkat Usia	19
2. Pegawai Teknis Yustisial	19
a. Data Tenaga Hakim	20
b. Data Tenaga Teknis Kepaniteraan	21
c. Data Tenaga Teknis Kejurusitaan	22
3. Data Sumber Daya Manusia Non Teknis	23
a. Data Pejabat Struktural	23
b. Data Fungsional Umum	24
c. Data Tenaga Kontrak	24
4. Data Diklat, Pelatihan dan Bimbingan serta Diklat di Tempat Kerja	25
5. Daftar Mutasi	29
6. Kenaikan Pangkat	31
7. Penghargaan Satya Lencana	34
8. Pensiun	35

<b>B. Keadaan Perkara</b>	36
1. Rekapitulasi Perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru	36
a. Perkara diterima Tahun 2016	37
b. Perkara Diterima dan Diputus Tahun 2016	38
c. Perkara diputus dan diminutasi Tahun 2016	40
d. Perkara diterima dan diputus lima tahun terakhir (2012-2016)	41
e. Eksekusi	42
f. Mediasi Perkara	42
2. Access to Justice bagi Masyarakat Miskin, Kaum Perempuan dan Kelompok Marjinal	44
a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara	44
b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan	44
c. Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan	44
3. Layanan Meja Informasi dan pengaduan	45
4. Keuangan Perkara	46
1. Putusan Yang diajukan Banding	48
2. Putusan Yang diajukan Kasasi	48
3. Putusan Yang diajukan Peninjauan Kembali	49
<b>C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana</b>	50
1. Sarana dan Prasarana Gedung	50
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	51
3. Pengelolaan Tata Persuratan	53
4. Pengelolaan Perpustakaan	54
5. Bidang Kinerja Pelayanan Publik	54
<b>D. Pengelolaan Keuangan</b>	55
<b>E. Dukungan Teknologi Informasi</b>	60
<b>F. Regulasi Tahun 2016</b>	61
<b>BAB IV PENGAWASAN</b>	63
A. Internal	63
B. Evaluasi	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	68
A. Kesimpulan	68
B. Rekomendasi	69

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel II.1 : Standar Operational Procedure (Kepaniteraan)	10
Tabel II.2 : Standar Operational Procedure (Kesekretariatan)	13
Tabel II.3 : Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	15
Tabel III.1 : Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	18
Tabel III.2 : Data Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan PNS	18
Tabel III.3 : Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Tabel III.4 : Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia	19
Tabel III.5 : Data Tenaga Hakim	20
Tabel III.6 : Data Tenaga Teknis Kepaniteraan	21
Tabel III.7 : Data Tenaga Teknis Kejurusitaan	23
Tabel III.8 : Data Pejabat Struktural	24
Tabel III.9 : Data Fungsional Umum	24
Tabel III.10 : Data Tenaga Kontrak	25
Tabel III.11 : Data Diklat, Pelatihan Dan Bimbingan Pegawai Teknis	26
Tabel III.12 : Data Diklat, Pelatihan Dan Bimbingan Pegawai Non Teknis	27
Tabel III.13 : Daftar Mutasi di Pengadilan Agama Pekanbaru	29
Tabel III.14 : Daftar Kenaikan Pangkat Reguler per April 2016	32
Tabel III.15 : Daftar Kenaikan Pangkat Dalam Jabatan per April 2016	32
Tabel III.16 : Daftar Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah per April 2016	32
Tabel III.17 : Daftar Kenaikan Pangkat Reguler per Oktober 2016	33
Tabel III.18 : Daftar Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2016	33
Tabel III.19 : Daftar Jumlah Pegawai yang menerima Satya Lencana	34
Tabel III.20 : Daftar Pegawai yang menerima Satya Lencana	35
Tabel III.21 : Daftar Pegawai yang mencapai Batas Usia Pensiun	36
Tabel III.22 : Jenis Perkara diterima tahun 2016	37
Tabel III.23 : Jenis Perkara diterima tahun 2016	39
Tabel III.24 : Perkara diputus dan minutasi tahun 2016	40
Tabel III.25 : Perkara yang diterima dan diselesaikan selama lima tahun terakhir	41
Tabel III.26 : Data perkara eksekusi lima tahun terakhir	42
Tabel III.27 : Data perkara yang dimediasi pada tahun 2016	42
Tabel III.28 : Dipa 04 Access to justice bagi masyarakat miskin kaum perempuan dan kelompok marginal	43

Tabel III.29	: Tabel layanan pembebasan biaya perkara	44
Tabel III.30	: Data Pos Bantuan Hukum	44
Tabel III.31	: Sidang diluar gedung pengadilan	45
Tabel III.32	: Data Pos Bantuan Hukum	45
Tabel III.33	: Layanan Meja Informasi dan Pengaduan	45
Tabel III.34	: Data Keuangan Perkara	46
Tabel III.35	: Prosentase Penggunaan Keuangan Perkara selama Tahun 2016	47
Tabel III.36	: Data Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses	47
Tabel III.37	: Perkara Banding selama 5 tahun	48
Tabel III.38	: Data Perkara Kasasi 5 tahun terakhir	48
Tabel III.39	: Data Perkara Peninjauan Kembali selama 5 tahun terakhir	49
Tabel III.40	: Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	50
Tabel III.41	: DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA.RI	55
Tabel III.42	: Alokasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA.RI	57
Tabel III.43	: DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) Wilayah Provinsi Riau	57
Tabel III.44	: DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)	57
Tabel III.45	: Satker Korwil DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)	58
Tabel III.46	: Satker Korwil DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)	58
Tabel IV.1	: Hakim Pengawas Bidang	63

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Kebijakan Peradilan Agama Pekanbaru

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sangat penting dan strategis karena di dalamnya dicantumkan dasar dan paradigma baru lembaga peradilan di Indonesia yang lebih mengarah kepada pelayanan, perubahan paradigma ini lebih dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan Agama menyerahkan salinan putusan kepada para pihak paling lambat empat belas hari setelah perkara diputus<sup>1</sup>. Oleh karena itu paradigma Peradilan Agama telah bergeser dari sekedar lembaga penegak hukum menjadi pelayan masyarakat. Perubahan paradigma peradilan ini, oleh Ketua Mahkamah Agung telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Selain dari itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan kebijakan mengenai Bantuan Hukum, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Kebijakan pertama memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapat salinan putusan, sedangkan kebijakan kedua menjamin masyarakat miskin dan yang domisilinya sulit dijangkau untuk dapat berperkara ke Pengadilan Agama. Dua kebijakan diatas memberikan makna yang sangat berarti kepada para pencari keadilan, implementasi dari dua peraturan kebijakan tersebut menuntut tersedianya anggaran yang memungkinkan melayani masyarakat yang difokuskan pada pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu melalui pembebasan biaya perkara.

Dua fokus pelayanan ini menjadikan masyarakat dapat memperoleh keadilan *Justice for All*, sehingga visi Pengadilan Agama Pekanbaru menjadi Pengadilan yang Agung dapat terwujud.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 60 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
Halaman 1 dari 68 "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2016"

Harapan ini berangkat dari diterapkannya sistem keterbukaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sebagai respon atas Surat Keputusan MA RI Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Selain dari itu, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Pengadilan mengharuskan adanya layanan standar yang dibakukan oleh lembaga peradilan dan standar mutu layanan yang akan diperoleh penerima layanan. Berkenaan dengan mutu layanan ini, rapat pleno Kamar pada tanggal 19 Desember 2013 di Mega Mendung yang mendorong pengadilan sebagai penyedia layanan untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan sebagai penerima layanan. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai salah satu lembaga peradilan yang tugas pokoknya adalah memberikan layanan bagi pencari keadilan telah merespons keinginan Mahkamah Agung dalam menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 dengan meraih Sertifikat ISO 9001: 2008 pada tanggal 25 Januari 2016 dari Badan Sertifikasi Integrated Assessment Services (IAS).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 tidak terlepas dari semangat keluarga besar Pengadilan Agama Pekanbaru untuk membumikan Motto yang disepakati, yaitu “PRIMA DALAM PELAYANAN, KONSISTEN DENGAN ATURAN”, sehingga motto ini tidak sekedar ungkapan, tetapi sebagai pemicu dan pemacu semangat dalam memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan. Kebijakan umum yang diberlakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari 9 area program reformasi birokrasi yang diamanatkan Mahkamah Agung RI untuk dilaksanakan. Kesembilan area reformasi birokrasi tersebut adalah:

No	Area	Hasil Yang Diharapkan
1.	Manajemen perubahan	Terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
2.	Penataan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga dengan menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan

		perundang-undangan.
3.	Penataan dan penguatan organisasi	Meningkatkan efisiensi organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
4.	Penataan ketatalaksanaan	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah.
5.	Penataan sistem manajemen SDM aparatur	Menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan.
6.	Penguatan pengawasan	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan negara dan menurun tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga.
7.	Penguatan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
8.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
9.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Reformasi birokrasi berjalan dan dilaksanakan sesuai ketentuan dan target dalam roadmap masing-masing Kementerian/Lembaga

Untuk mewujudkan 9 area reformasi birokrasi tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengambil langkah yang berorientasi kepada pelayanan dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan prima yang berbasis kepada akuntabilitas kinerja yang transparan dalam pengelolaan keuangan, keuangan DIPA maupun keuangan perkara. Transparansi dalam keuangan perkara dilakukan dengan cara mempublikasikan panjar biaya perkara dan mengembalikan sisa panjar serta menyurati para pencari keadilan yang sisa panjarnya belum diambil. Untuk memastikan layanan, Pengadilan Agama Pekanbaru pada bulan Januari Tahun 2016 tetalah menetapkan standar pelayanan sebagaimana yang dikehendaki KMA Nomor 026 Tahun 2012 dan untuk mengetahui dan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disuguhkan Pengadilan Agama Pekanbaru kepada masyarakat pencari keadilan, telah dilakukan pengukuran

Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 dengan hasil 79,40 (Baik).

## B. Visi dan Misi

Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui Reformasi Birokrasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berbagai kondisi yang sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses perubahan, maka dinilai perlu arah dan langkah dalam mencapai cita-cita.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkaitan dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan Visi badan peradilan, yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”. Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka Visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung”**.

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru;
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru

## C. Renstra (Rencana Strategis)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut di atas Mahkamah Agung mengambil langkah dengan merumuskan *blueprint* Mahkamah Agung dalam kurun waktu 25 tahun (2011-2035), sehingga pada tahun 2035 yang akan datang cita-cita Halaman 4 dari 68 **“Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2016”**

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang dibawahnya sebagai Peradilan Yang Agung sudah menjadi kenyataan. Untuk mencapai visi tersebut dirumuskanlah misi yang dibarengi perumusan rencana stratejik dalam kurun waktu lima tahunan. Untuk tahun 2016 adalah Perumusan rencana stratejik lima tahunan kedua yang pada hakikatnya sebagai penjabaran dari misi yang merupakan program jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun lembaga peradilan di Indonesia. Program jangka panjang lembaga peradilan dengan misi tersebut meliputi seluruh aspek peradilan dalam kerangka pembaruan peradilan yang komprehensif dan sistematis meliputi:

1. Pembaruan fungsi dan Teknis dan Manajemen perkara
  - a. Pembaruan Fungsi Teknis
  - b. Pembaruan Manajemen Perkara
2. Pembaruan Fungsi Pendukung
  - a. Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
  - b. Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - c. Pembaruan sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
  - d. Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran
  - e. Pembaruan Pengelolaan Aset
  - f. Pembaruan Teknologi Informasi
3. Pembaruan Akuntabilitas
  - a. Pembaruan Sistem Pengawasan
  - b. Pembaruan sistem Keterbukaan Informasi (IT)

Dalam melaksanakan renstra di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru menyusun program kerja dengan targetnya sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memberikan layanan kepada penerima layanan internal dan eksternal dengan memaksimalkan penerapan teknologi informasi untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien.
2. Meningkatnya pelayanan dalam segala aspek demi terselenggaranya layanan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang dilakukan oleh aparat yang bersih dan bermartabat.
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM) Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga terwujud aparat Pengadilan Agama Pekanbaru yang profesional dalam menjalankan tugas.

4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru dengan menaati standar pelayanan yang dipublikasikan.

Dengan melaksanakan rencana yang terdapat dalam Rencana Stratejik di Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut diharapkan dapat menjawab *issu*:

1. Terwujudnya layanan yang efektif dan efisien kepada penerima layanan internal dan eksternal sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi.
2. Kepercayaan penerima layanan kepada lembaga peradilan untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sangat dipengaruhi oleh integritas dan kualitas pemberi layanan.
3. Penerimaan masyarakat penerima layanan terhadap layanan Pengadilan Agama Pekanbaru sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia pemberi layanan.
4. Kepuasan penerima layanan berkaitan erat dengan terpublikasikannya standar layanan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

## D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan sebagai berikut:

### Bab I: Pendahuluan

Pada bagian ini akan diuraikan tentang kebijakan umum Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai penerapan dari visi dan misi Mahkamah Agung yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategik kedua pada Renstra lima tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Mahkamah Agung yang sinergi dengan 9 (Sembilan) area reformasi birokrasi.

### Bab II: Struktur Organisasi (Tupoksi)

Menguraikan bagan organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru.

### Bab III: Pembinaan dan Pengelolaan

- Pada bagian A Menguraikan tentang sumber daya manusia mulai dari profil dan data pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru, formasi jabatan struktural, mutasi dan promosi, kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan, pembinaan keterampilan pegawai, penghargaan satya lencana, dan pensiun pegawai.
- Pada bagian B menguraikan tentang keadaan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru, pelaksanaan program *access to justice* berupa layanan bantuan hukum yang meliputi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara (*prodeo*), dan Pos Bantuan Hukum.
- Pada bagian C menguraikan tentang pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pekanbaru yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan.
- Pada Bagian D menguraikan tentang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaaan anggaran, keuangan PNBP, dan pelaporan anggaran.
- Pada bagian E menguraikan tentang pengembangan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
- Pada bagian F menguraikan tentang regulasi yang berlaku di Pengadilan Agama Pekanbaru sepanjang tahun 2016.

## Bab IV: Pengawasan

Pada bagian ini diuraikan tentang sistem pengawasan yang berlaku di pengadilan tingkat pertama, yaitu pengawasan internal yang terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawasan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

## Bab VI: Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada bagian ini merupakan pengungkapan pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Pekanbaru sepanjang tahun 2016 yang di dalamnya menyampaikan sejauhmana capaian atas program kerja yang ditetapkan pada awal tahun 2016 dan seberapa besar kegagalan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, dalam laporan ini, juga akan dikemukakan

permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan program sehingga target yang telah ditetapkan dalam program kerja tersebut tidak tercapai seluruhnya. Pada bagian akhir penyampaian laporan ini Pengadilan Agama Pekanbaru menyampaikan rekomendasi yang bertujuan agar masalah dan hambatan yang menjadi penyebab tidak tercapai seluruhnya program kerja yang telah disepakati bersama oleh pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru, atau setidaknya dapat mengurangi tingkat ketidaktercapaian program pada tahun 2017 yang akan datang.

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI

#### A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Dengan adanya SOP yang dapat dijadikan sebagai bisnis proses akan melahirkan empat kepastian bagi layanan di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu kepastian layanan, kepastian petugas yang melayani, kepastian lama waktu masing-masing layanan dan biaya yang dibebankan pada masing-masing layanan. Berkenna dengan SOP ini oleh Permenpan Nomor 80 Tahun 2012 telah menyebutkannya sebagai tata naskah dinas yang pengaturannya disebut dalam Permenpan Nomor 35 Tahun 2012. SOP ini merupakan bisnis proses yang berlaku bagi setiap layanan yang melibatkan beberapa bagian dan individu yang berbeda dalam satuan layanan, sehingga SOP ini merupakan standar kerja yang bersifat teknis. Oleh karena itu SOP ini mempunyai masa berlaku dan memerlukan penyesuaian seiring dengan berkembangnya peraturan dan sarana dalam pemberian layanan. Khususnya di Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam memberikan layanan kepada penerima layanan internal dan eksternal sudah diberlakukan SOP sebanyak 88 bidang teknis yang diberlakukan sejak tanggal 10 Desember 2015 dan sebagian SOP tersebut telah direvisi pada bulan Agustus 2016 karena terjadi perubahan dokumen eksternal yang menjadi landasan operasional dalam pemberian layanan. SOP yang mengalami perubahan tersebut adalah pada layanan eksternal di Kepaniteraan dalam masalah mediasi yang semula berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi.

SOP sebagai bisnis proses akan selalu mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan regulasi dan teknologi serta kualitas sumber daya manusia yang memberikan layanan. Hingga saat ini di Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat dua klasifikasi SOP, yaitu SOP yang bersifat Teknis berjumlah 59 SOP,

sedangkan yang bersifat non teknis yang lebih berorientasi kepada pemberian layanan kepada penerima layanan internal berjumlah 37 SOP. Dengan demikian, dalam penguraian SOP pada laporan tahunan ini tidak dapat diurai sesuai dengan jabatan, karena satu layanan akan melibatkan beberapa bagian bidang tugas dan individu yang berbeda, sehingga akan sangat tidak mungkin SOP dibuat perjabatan karena bisnis proses tidak hanya melibatkan satu orang, tetapi lebih dari satu orang dan lebih dari satu jabatan. Untuk selengkapnya, rincian SOP yang merupakan bisnis proses di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Standar Operational Procedure Kepaniteraan

No. Urut	Nomor SOP	Nama SOP	Bidang
1	2	3	5
1	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-01	Pendaftaran Perkara Bagi Yang Buta Huruf	Kepaniteraan
2	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-02	Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama	Kepaniteraan
3	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-03	Pendaftaran Perkara Banding	Kepaniteraan
4	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-04	Pendaftaran Perkara Kasasi	Kepaniteraan
5	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-05	Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali	Kepaniteraan
6	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-06	Eksekusi Riil, Pengosongan dan Pembongkaran	Kepaniteraan
7	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-07	Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	Kepaniteraan
8	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-08	Permohonan dan Gugatan Secara Cuma-Cuma (Prodeo) pada Tingkat Pertama	Kepaniteraan
9	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-09	Permohonan Banding Secara Cuma-Cuma (Prodeo)	Kepaniteraan
10	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-10	Permohonan Kasasi Secara Cuma-Cuma (Prodeo)	Kepaniteraan
11	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-11	Sita Diluar Gugatan	Kepaniteraan

12	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-12	Sita Dalam Gugatan	Kepaniteraan
13	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-13	Sita Eksekusi	Kepaniteraan
14	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-14	Sita Buntut	Kepaniteraan
15	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-15	Mediasi Tingkat Pertama	Kepaniteraan
16	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-16	Mediasi Perkara Banding	Kepaniteraan
17	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-17	Mediasi Perkara Kasasi	Kepaniteraan
18	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-18	Mediasi Perkara Peninjauan Kembali	Kepaniteraan
19	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-19	Pemberkasan Perkara dan Minutasi	Kepaniteraan
20	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-20	Penyampaian Salinan Putusan/Penetapan	Kepaniteraan
21	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-21	Penyampaian Akta Cerai	Kepaniteraan
22	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-22	Laporan Keadaan Perkara (LI.PA1)	Kepaniteraan
23	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-23	Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus (LI.PA8)	Kepaniteraan
24	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-24	Laporan Keadaan Perkara Yang Dimohon Banding (LI.PA2)	Kepaniteraan
25	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-25	Laporan Keadaan Perkara Yang Dimohon Kasasi (LI.PA3)	Kepaniteraan
26	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-26	Laporan Keadaan Perkara Yang Dimohon Eksekusi (LI.PA5)	Kepaniteraan
27	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-27	Laporan Tentang Kegiatan Hakim (LI.PA6)	Kepaniteraan
28	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-28	Konsignasi	Kepaniteraan
29	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-29	Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat	Kepaniteraan
30	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-30	Pemberitahuan Pernyataan Banding	Kepaniteraan
31	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-31	Penerimaan Memori Banding	Kepaniteraan

32	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-32	Pemberitahuan Memori Banding	Kepaniteraan
33	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-33	Penerimaan Kontra Memori Banding	Kepaniteraan
34	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-34	Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Kepaniteraan
35	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-35	Pemberitahuan Inzage (Pemeriksaan Berkas)	Kepaniteraan
36	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-36	Pemeriksaan Berkas (Inzage)	Kepaniteraan
37	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-37	Pencabutan Banding Sebelum Berkas Permohonan Banding	Kepaniteraan
38	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-38	Pemberitahuan Pencabutan Banding	Kepaniteraan
39	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-39	Pengiriman Berkas Permohonan Banding	Kepaniteraan
40	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-40	Pencabutan Permohonan Banding Pasca Pengiriman Berkas	Kepaniteraan
41	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-41	Penerimaan Salinan Putusan Sela PTA Pekanbaru di PA Pekanbaru	Kepaniteraan
42	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-42	Pemberitahuan Putusan Sela PTA Pekanbaru di PA Pekanbaru	Kepaniteraan
43	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-43	Pengiriman Fotokopi Pemberitahuan Putusan Sela	Kepaniteraan
44	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-44	Pengarsipan Berkas Perkara	Kepaniteraan
45	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-45	Pemberitahuan Upaya Perdamaian Perkara Banding	Kepaniteraan
46	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-46	Pengiriman Hasil Perdamaian Perkara Banding	Kepaniteraan
47	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-47	Pencatatan Perkara Masuk	Kepaniteraan
48	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-48	Pembuatan dan Pencatatan PMH, Penunjukan PP dan	Kepaniteraan

		JS/JSP	
49	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-49	Pembuatan dan Pencatatan PHS (Biasa) dan Instrumen Perintah Pemanggilan	Kepaniteraan
50	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-50	Pemanggilan	Kepaniteraan
51	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-51	Pembuatan Surat Panggilan	Kepaniteraan
52	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-52	Pencatatan Kegiatan Perkara Berjalan Ke Dalam Register Perkara	Kepaniteraan
53	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-53	Persiapan Sebelum Pelaksanaan Persidangan	Kepaniteraan
54	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-54	Persidangan	Kepaniteraan
55	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-55	Persidangan Lanjutan	Kepaniteraan
56	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-56	Persidangan Non Cerai	Kepaniteraan
57	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-57	Persidangan Lanjutan Non Cerai	Kepaniteraan
58	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-58	Pengembalian Sisa Panjar	Kepaniteraan
59	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PAN-59	Publikasi Putusan/Penetapan	Kepaniteraan

Tabel II.2 Standar Operational Procedure Kesekretariatan

No. Urut	Nomor SOP	Nama SOP	Bidang
1	2	3	5
01	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-01	Pengelolaan Surat Masuk	Kesekretariatan
02	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-02	Pengelolaan Surat Keluar	Kesekretariatan
03	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-03	Pengelolaan Penatausahaan Arsip	Kesekretariatan
04	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-04	Pengelolaan BMN Aset Tetap	Kesekretariatan
05	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-05	Pengelolaan BMN Aset Lancar	Kesekretariatan
06	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-06	Administrasi	Kesekretariatan

		Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	
07	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-07	Pengelolaan Perpustakaan	Kesekretariatan
08	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-08	Perawatan Sarana dan Prasarana	Kesekretariatan
09	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-09	Kebersihan dan Keindahan	Kesekretariatan
10	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-10	Keamanan	Kesekretariatan
11	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-11	Protokoler Pimpinan	Kesekretariatan
12	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-12	Protokoler Pengambilan Sumpah	Kesekretariatan
13	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-13	Protokoler Sidang	Kesekretariatan
14	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-14	Protokoler Penjemputan dan Penerimaan Tamu	Kesekretariatan
15	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-15	Humas	Kesekretariatan
16	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-16	Pelayanan Sarana	Kesekretariatan
17	SOP-PAPBR-KLAS I.A-UM-17	Teknologi Informasi	Kesekretariatan
18	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PEG-01	Cuti	Kesekretariatan
19	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PEG-02	Administrasi	Kesekretariatan
20	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PEG-03	Karpeg, Karis, Karsu, Taspen dan Askes	Kesekretariatan
21	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PEG-04	Kenaikan Gaji Berkala	Kesekretariatan
22	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PEG-05	Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun	Kesekretariatan
23	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PEG-06	Penilaian Prestasi Kerja PNS	Kesekretariatan
24	SOP-PAPBR-KLAS I.A-PEG-07	Pelaksanaan Disiplin	Kesekretariatan
25	SOP-PAPBR-KLAS I.A-KEU-01	Perencanaan Anggaran	Kesekretariatan
26	SOP-PAPBR-KLAS I.A-KEU-02	Realisasi Anggaran	Kesekretariatan
27	SOP-PAPBR-KLAS I.A-KEU-03	Gaji Induk	Kesekretariatan
28	SOP-PAPBR-KLAS I.A-KEU-04	Uang Makan	Kesekretariatan
29	SOP-PAPBR-KLAS I.A-KEU-05	Gaji ke-13	Kesekretariatan
30	SOP-PAPBR-KLAS I.A-KEU-06	Remunerasi	Kesekretariatan
31	SOP-PAPBR-KLAS I.A-KEU-07	Uang Persediaan	Kesekretariatan

32	SOP-PAPBR-KLAS I.A-KEU-08	Pengajuan Ganti Uang Persediaan	Kesekretariatan
33	SOP-PAPBR-KLAS I.A-KEU-09	Pengajuan SPM Langsung	Kesekretariatan
34	SOP-PAPBR-KLAS I.A-KEU-10	Pengelolaan PNBP	Kesekretariatan
35	SOP-PAPBR-KLAS I.A-KEU-11	Pelaporan SAKPA	Kesekretariatan
36	SOP-PAPBR-KLAS I.A-KEU-12	Buku Kas	Kesekretariatan
37	SOP-PAPBR-KLAS I.A-KEU-13	Buku Pembantu	Kesekretariatan

### **B. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)**

Sejak tahun 2014, penilian terhadap kinerja pegawai mengalami perubahan format dari yang sebelumnya disebut dengan DP3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 menjadi Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri yang diberlakukan sejak tahun 2014. Terhadap aturan ini, oleh BKN telah mengeluarkan juklak dalam bentuk Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Dengan masing-masing pegawai mempunyai tugas yang berbeda.

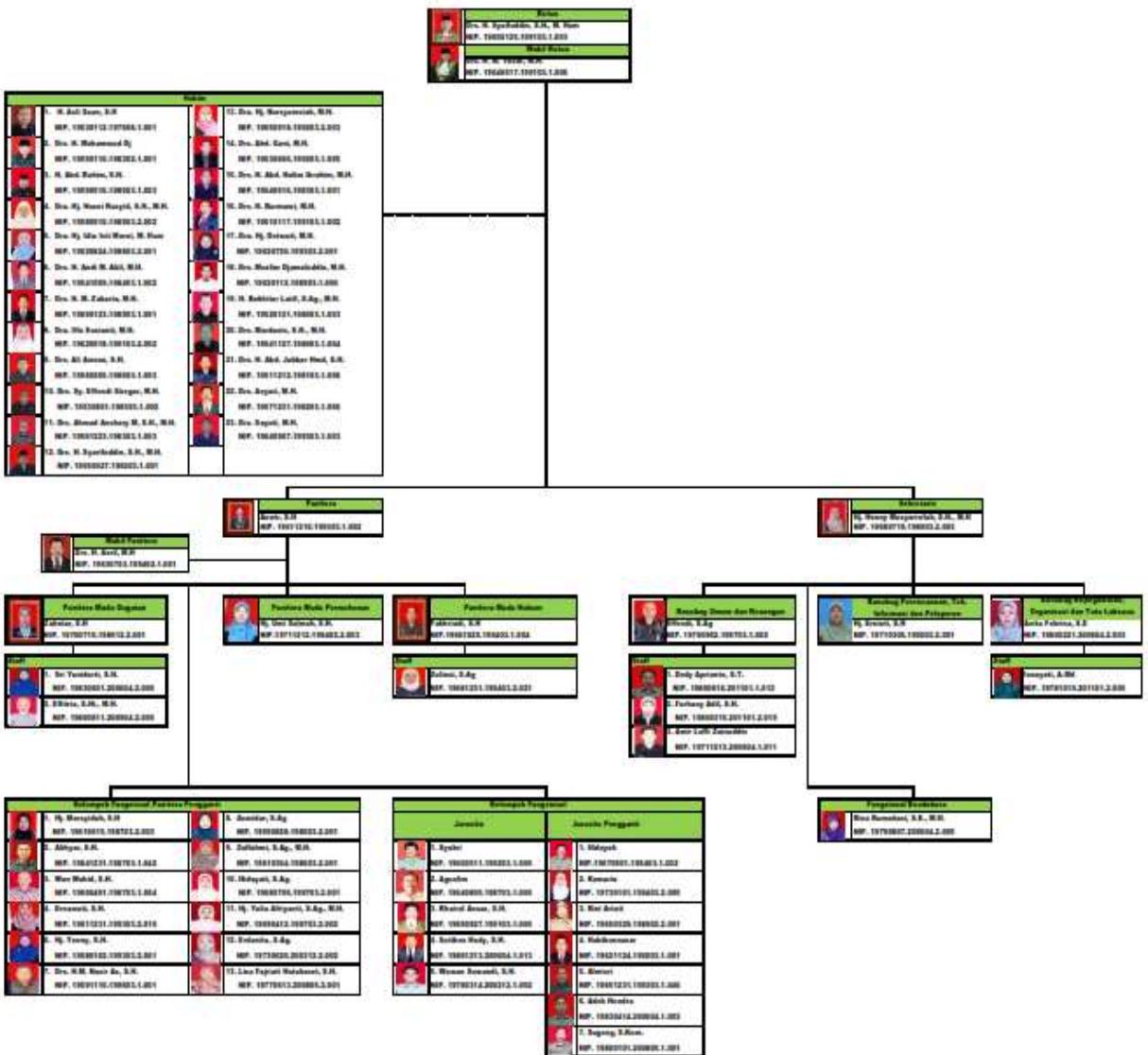
Berkenaan dengan hal itu, maka dalam penyampaian dalam laporan tahunan tahun 2016 hanya akan dilaporkan secara kuantitas SKP seluruh pegawai pada Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.3: Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

No	Nama Jabatan	Jumlah SKP				
		Non Eselon	Eselon IIIa	Eselon IVa	Pelaksana	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
01	Ketua	1				1
02	Wakil Ketua	1				1
03	Hakim				23	23
04	Kepaniteraan:					
05	Panitera				1	1
06	Wakil Panitera				1	1

07	Panitera Muda Permohonan				1	1
08	Panitera Muda Gugatan				1	1
09	Panitera Muda Hukum				1	1
10	Panitera Pengganti				12	12
11	Jurusita				5	5
12	Jurusita Pengganti				7	7
13	Kesekretariatan:					
14	1. Sekretaris		1			1
15	2. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan			1		1
16	3. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana			1		1
17	4. Kasubbag Umum dan Keuangan			1		1
18	5. Fungsional Umum				8	8
Jumlah						66

## **STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS I-A**



### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

##### A. Sumber Daya Manusia

###### 1. Data Pegawai

Pegawai di Pengadilan Agama Pekanbaru Per 31 Desember 2016 berjumlah 79 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 66 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 13 orang dengan rincian klasifikasi sebagai berikut:

###### a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel III.1: Data pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Tenaga Kontrak
		Jumlah	Jumlah
1.	S3	-	-
2.	S2	26	-
3.	S1	30	7
4.	D3	1	-
5.	SLTA	9	5
6.	SLTP	-	-
7.	SD	-	1
Jumlah		66	13

###### b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan PNS

Tabel III.2: Data pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

No	Pangkat dan Golongan PNS	Jumlah
1	IV/d	4
2	IV/c	17
3	IV/b	4

4	IV/a	5
5	III/d	14
6	III/c	5
7	III/b	10
8	III/a	3
9	II/d	2
10	II/c	1
11	II/b	1
12	II/a	-
Jumlah		66

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel III.3: Data pegawai berdasarkan jenis kelamin

No.	PNS		Tenaga Kontrak
	Jenis Kelamin	Jumlah	Jumlah
1	Laki-Laki	39	10
2	Perempuan	27	3
Jumlah		66	13

d. Berdasarkan Tingkat Usia

Tabel III.4: Data pegawai berdasarkan tingkat usia

No	PNS				Tenaga Kontrak		
	Usia	Laki-Laki		Usia	Laki-Laki		Usia
1	20-30	-	1	20-30	-	1	20-30
2	31-40	5	2	31-40	5	2	31-40
3	41-50	4	3	41-50	4	3	41-50

4	51-60	20	4	51-60	20	4	51-60
5	61-65	10	5	61-65	10	5	61-65
Total				66	Total		Total

## 2. Pegawai Teknis Yudisial

Kondisi pegawai di bidang teknis yudisial pada akhir tahun 2016 seluruhnya berjumlah 54 (lima puluh empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 23 (dua puluh tiga) orang Hakim, 1 (satu) orang Panitera, 1 (satu) orang Wakil Panitera, 3 (tiga) orang Panitera Muda, 12 (dua belas) orang Panitera Pengganti, 5 (lima) orang Jurusita dan 7 (tujuh) orang Jurusita Pengganti, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

### a. Data Tenaga Hakim

Tabel III.5: Data Tenaga Hakim

No	Nama/NIP	Jenis Kelamin	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. Syaifuddin, S.H., M. Hum NIP. 196501251991031003	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	Magister Humaniora	Ketua	Sedang Pendidikan S3
2	Drs. H. M. Yusar, M.H. NIP. 196405171991031006	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	Magister Hukum	Wakil Ketua	
3	H. Asli Sa'an, S.H. NIP. 195301121976081001	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sarjana Hukum	Hakim	
4	Drs. H. Muhammad Dj. NIP. 195501101983021001	Laki-laki	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sarjana Hukum	Hakim	
5	H. Abd. Rahim, S.H. NIP. 195505161980031003	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sarjana Hukum	Hakim	
6	Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. NIP. 195809101989032003	Perempuan	Pembina Utama Muda (IV/c)	Magister Hukum	Hakim	
7	Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum. NIP. 196208241988032001	Perempuan	Pembina Utama Muda (IV/c)	Magister Humaniora	Hakim	Sedang Pendidikan S3
8	Drs. H. Andi M. Akil, M.H. NIP. 195410091984031002	Laki-laki	Pembina Utama Madya (IV/d)	Magister Hukum	Hakim	
9	Drs. H. M. Zakaria, M.H. NIP. 196501231989031001	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	Magister Hukum	Hakim	Sedang Pendidikan S3
10	Dra. Hj. Ilfa Susanti, M.H. NIP. 196209181991032002	Perempuan	Pembina Utama Muda (IV/c)	Magister Hukum	Hakim	
11	Drs. Ali Amran, S.H.	Laki-laki	Pembina Utama	Sarjana	Hakim	

	NIP. 195602051986031003		Muda (IV/c)	Hukum		
12	Drs. Sy. Effendi Siregar, M.H. NIP. 195308011983031002	Laki-laki	Pembina Utama Madya (IV/d)	Magister Hukum	Hakim	
13	Drs. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. NIP. 195612231983031003	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	Magister Hukum	Hakim	
14	Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. NIP. 195509271992031001	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	Magister Hukum	Hakim	
15	Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. NIP. 196509181992032003	Perempuan	Pembina Tk. I (IV/b)	Magister Hukum	Hakim	Sedang Pendidikan S3
16	Drs. Abd. Gani, M.H. NIP. 196306061992031005	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	Magister Hukum	Hakim	
17.	Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. NIP. 195405161983031001	Laki-laki	Pembina Utama Madya (IV/d)	Magister Hukum	Hakim	
18	Drs. H. Barmawi, M.H. NIP. 196101171991031003	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	Magister Hukum	Hakim	Sedang Pendidikan S3
19	Dra. Hj. Detwati, M.H. NIP. 196207201993032001	Perempuan	Pembina Tk. I (IV/b)	Magister Hukum	Hakim	
20	Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. NIP. 196201121989031006	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	Magister Hukum	Hakim	
21	H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. NIP. 195201211980031003	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	Magister Hukum	Hakim	
22	Drs. Mardanis, S.H., M.H. NIP. 195411271980031004	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	Magister Hukum	Hakim	
23	Drs. H. Abd. Jabbar, HMD, S.H. NIP. 195112121981031006	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sarjana Hukum	Hakim	
24	Drs. Asyari, M.H. NIP. 195712311982031066	Laki-laki	Pembina Tk. I (IV/b)	Magister Hukum	Hakim	
25	Drs. Sayuti, M.H. NIP. 196409071993031003	Laki-laki	Pembina Tk. I (IV/b)	Magister Hukum	Hakim	

#### b. Data Tenaga Teknis Kepaniteraan

Tabel III.6: Data tenaga teknis kepaniteraan

No	Nama/NIP	Jenis Kelamin	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Azwir, S.H. NIP. 196112101993031002	Laki-laki	Pembina (IV/a)	Sarjana Hukum	Panitera	
2	Drs. H. Asril, M.H. NIP. 196307031994021001	Laki-laki	Pembina (IV/a)	Magister Hukum	Wakil Panitera	

# Laporan Tahunan

**2016**

3	Zahniar, S.H. NIP. 197007101989122001	Perempuan	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana Hukum	Panitera Muda Gugatan	
4	Hj. Umi Salmah, S.H. NIP. 197312121994022003	Perempuan	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana Hukum	Panitera Muda Permohonan	
5	Fakhriadi, S.H. NIP. 197312121994022003	Laki-laki	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana Hukum	Panitera Muda Hukum	Sedang Pendidikan S2
6	Hj. Marsyidah, S.H. NIP. 196106151987032003	Perempuan	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana Hukum	Panitera Pengganti	
7	Akhyar, S.H. NIP. 196412311987031042	Laki-laki	Penata (III/c)	Sarjana Hukum	Panitera Pengganti	
8	Wan Wahid, S.H. NIP. 196004011987031004	Laki-laki	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana Hukum	Panitera Pengganti (diperbantukan sebagai petugas banding)	
9	Ernawati, S.H. NIP. 196112311993032010	Perempuan	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana Hukum	Panitera Pengganti	
10	Hj. Yenni, S.H. NIP. 195801021993032001	Perempuan	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana Hukum	Panitera Pengganti	
11	Drs. H. M. Nasir As, S.H. NIP. 195911101996031001	Laki-laki	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana Hukum	Panitera Pengganti	
12	Asmidar, S.Ag NIP. 195908281980032001	Perempuan	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana Agama	Panitera Pengganti	
13	Zulfahmi, S.Ag., M.H. NIP. 196103041986032001	Perempuan	Pembina (IV/a)	Magister Hukum	Panitera Pengganti	
14	Hidayati, S.Ag NIP. 196807061997032001	Perempuan	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana Agama	Panitera Pengganti (diperbantukan sebagai pembuat laporan perkara)	
15	Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. NIP. 196904121997032002	Perempuan	Pembina (IV/a)	Magister Hukum	Panitera Pengganti (diperbantukan sebagai pemegang Buku Induk Keuangan Perkara)	
16	Erdanita, S.Ag NIP. 197306022003122002	Perempuan	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana Agama	Panitera Pengganti (diperbantukan sebagai petugas register dan bendahara biaya proses)	Sedang Pendidikan S2
17	Liza Fajriati Hutabarat, S.H. NIP. 197706132008052001	Perempuan	Penata (III/c)	Sarjana Hukum	Panitera Pengganti	Sedang Pendidikan S2

c. Data Tenaga Teknis Kejurusitaan

Tabel III.7: Data Tenaga Teknis Kejurusitaan

No	Nama/NIP	Jenis Kelamin	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Syukri NIP. 196505111992031005	Laki-laki	Penata Muda Tk. I (III/b)	SLTA	Jurusita	
2	Aguslim NIP. 196408051987031005	Laki-laki	Penata Muda Tk. I (III/b)	SLTA	Jurusita	
3	Khairul Anuar, S.H. NIP. 196509271991031005	Laki-laki	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana Hukum	Jurusita	
4	Sutikno Hady, S.H. NIP. 198012132006041013	Laki-laki	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sarjana Hukum	Jurusita	
5	Wawan Suwandi, S.H. NIP. 197803142002121002	Laki-laki	Pengatur Tk. I (II/d)	Sarjana Hukum	Jurusita	
6	Hidayah NIP. 196709011994031002	Laki-laki	Penata Muda (III/a)	SLTA	Jurusita Pengganti	
7	Komaria NIP. 197301011994032005	Perempuan	Penata Muda Tk. I (III/b)	SLTA	Jurusita Pengganti (diperbantukan sebagai petugas register)	
8	Rini Artati NIP. 196503291989022001	Perempuan	Penata Muda Tk. I (III/b)	SLTA	Jurusita Pengganti	
9	Habibunnazar NIP. 196211241992031001	Laki-laki	Penata Muda Tk. I (III/b)	SLTA	Jurusita Pengganti	
10	Almisri NIP. 196512311993031045	Laki-laki	Penata Muda Tk. I (III/b)	SLTA	Jurusita Pengganti (diperbantukan sebagai petugas register)	
11	Adek Hendra NIP. 19830414.200604.1.003	Laki-laki	Pengatur (II/c)	SLTA	Jurusita Pengganti (diperbantukan sebagai Petugas Perpustakaan)	
12	Sugeng, S. Kom NIP. 198001012008051001	Laki-laki	Penata Muda (III/a)	Sarjana Komputer	Jurusita Pengganti (Operator IT)	

**3. Data Sumber Daya Manusia Non Teknis**

**a. Data Pejabat Struktural**

Tabel III.8: Data Pejabat Struktural

No	Nama/NIP	Jenis Kelamin	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Hj. Henny Musyarrofah, S.H., M.H. NIP. 196807191989032003	Perempuan	Pembina (IV/a)	Magister Hukum	Sekretaris	
2	Efendi, S.Ag NIP. 197009021997031002	Laki-laki	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana Agama	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sedang Pendidikan S2
3	Hj. Erniati, S.H. NIP. 197103051992032001	Perempuan	Penata (III/c)	Sarjana Hukum	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Sedang Pendidikan S2
4	Anita Febrina, S.E. NIP. 198002212006042003	Perempuan	Penata (III/c)	Sarjana Ekonomi	Kasubbag Kepegawaian Ortala	

**b. Data Fungsional Umum**

Tabel III.9: Data Fungsional Umum

No	Nama/NIP	Jenis Kelamin	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Sri Yunidarti, S.H. NIP. 198306012006042005	Perempuan	Penata Muda (III/a)	Sarjana Hukum	Staf Panmud Gugatan (Kasir)	
2	Elpitria, S.HI., M.H. NIP. 198008112009042005	Perempuan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Magister Hukum	Staf Panmud Gugatan	
3	Zuliani, S.Ag NIP. 196812311994032021	Perempuan	Penata Tk. I (III/d)	Sarjana Agama	Staf Panmud Hukum	
4	Rina Ramadani, S.E., M.H. NIP. 197908072006042005	Perempuan	Penata (III/c)	Magister Hukum	Staf Subbag Umum & Keuangan (Bendahara Pengeluaran)	
5	Dedy Aprianto, S.T. NIP. 198006162011011012	Laki-laki	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sarjana Teknik Informatika	Staf Subbag Umum dan Keuangan	
6	Farhany Adil, S.H. NIP. 198006162011011012	Perempuan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sarjana Hukum	Staf Subbag Umum dan Keuangan	Sedang Pendidikan S2
7	Amir Luffi Zainuddin NIP. 19711213.200604.1.011	Laki-laki	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	SLTA	Staf Subbag Umum dan Keuangan	

8	Isnayati, A.Md NIP. 19781019.201101.2.005	Perempuan	Pengatur Tk. I (II/d)	Ahli Madya Komputer	Staf Subbag Kepgawaiian Ortala	
---	--	-----------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	--

### c. Data Tenaga Kontrak

Pada awal tahun 2016, jumlah tenaga kontrak di Pengadilan Agama Pekanbaru berjumlah 14 orang, tetapi sejak bulan November 2016 jumlah berjumlah 13 orang karena satu di antara yang 14 orang tersebut mengundurkan diri, yaitu Sistri Riarita, S.H., sehingga dalam laporan tahunan ini jumlah tenaga kontrak adalah 13 orang sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.10: Data Tenaga Kontrak

N o	Nama	Tempat/ Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6
1	Muhamad Taher, S.Ag	Bangkinang/ 25 Mei 1974	Laki-laki	Sarjana Agama	Sopir Pimpinan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru
2	Abu Bakar	Air Tiris/ 28 April 1985	Laki-laki	SLTA	Satpam
3	Eky Amrianto	Bukittinggi/ 23 Februari 1980	Laki-laki	SLTA	Satpam
4	Zaili, S.Psi	Kamp. Piliang/ 2 Mei 1978	Laki-laki	Sarjana Psikologi	Pramubakti merangkap sebagai staf Subbag Umum & Keuangan (Sopir Wakil Ketua dan Operasional Kantor)
5	Doni, S.HI	Pasir Pangaraian/ 14 April 1980	Laki-laki	Sarjana Hukum Islam	Pramubakti merangkap sebagai Petugas Meja Informasi
6	Yuni Hartatik, S.Pi	Pekanbaru/ 13 Oktober 1981	Perempuan	Sarjana Perikanan	Pramubakti merangkap sebagai Petugas Akte Cerai (Meja III)
7	Aulia Kurniawan Putra HS, S. Kom	Pekanbaru/ 27 September 1985	Laki-laki	Sarjana Komputer	Pramubakti merangkap sebagai Petugas Antrian Sidang
8	Siti Rahmah, S.H.	Selat Panjang/ 8 April 1980	Perempuan	Sarjana Hukum	Pramubakti merangkap sebagai staf Panmud Hukum
9	Heppy Surtina, S.HI	Pekanbaru/ 26 September 1983	Perempuan	Sarjana Hukum Islam	Pramubakti merangkap sebagai Petugas Meja I
10	Hendra Susila	Matur/ 2 Juni 1981	Laki-laki	SLTA	Pramubakti merangkap sebagai staf Subbag Perencanaan, IT dan Pelaporan (Operator SAIBA)
11	Salman Farisi	Padang/ 5 April 1975	Laki-laki	SLTA	Pramubakti
12	Mulki Alfuadi	Dabo Singkep/ 23 Juni 1986	Laki-laki	SLTA	Pramubakti

13	Sahril Siregar	Padang Sidempuan/ 23 Mei 1968	Laki-laki	SD	Pramubakti
----	----------------	-------------------------------------	-----------	----	------------

#### 4. Data Diklat, Pelatihan dan Bimbingan serta Diklat di Tempat Kerja

Pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengikuti Diklat, Pelatihan dan Bimbingan serta Diklat di Tempat Kerja sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel III.11: Data Diklat, Pelatihan Dan Bimbingan Pegawai Teknis

No	Pelatihan		Penyelenggaraan	
	Nama	Peserta	Tempat	Tanggal
1	2	3	4	5
01	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	Sugeng, S.Kom.	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	16 s.d. 19 Februari 2016
02	Sosialisasi Undang-Undang Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum	Hotel Grand Zuri. Jl. Teuku Umar No. 7 Pekanbaru.	25 April 2016
03	Pembinaan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan T. Pertama	Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum Drs. H. Barmawi, M.H. Dra. Hj. Detwati, M.H. Drs. Asyari, M.H	Goodway Hotel Batam	12 s.d. 14 Mei 2016
04	Kegiatan Bedah Berkas dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H. Drs. H. Andi M. Akil, M.H. Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum Drs. H. Barmawi, M.H. Drs. H. M. Zakaria, M.H. Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. Drs. Mardanis, S.H., M.H. Azwir, S.H.	Pengadilan Agama Bangkinang	31 Agustus s.d. 01 September 2016
05	Pembinaan oleh ketua Kamar dan Hakim Agung	Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum H. Asli Sa'an, S.H. Drs. H. Muhammad Dj. Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum Drs. H. Andi M. Akil, M.H. Drs. H. M. Zakaria, M.H. Dra. Ilfa Susanti, M.H. Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. Drs. Abd. Gani, M.H. Drs. Abd. Halim Ibrahim, M.H. Drs. H. Barmawi, M.H. Dra. Hj. Detwati, M.H. Drs. Muslim Dijjamaluddin, M.H. H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. Drs. Mardanis, S.H., M.H.	Hotel Alpha Jalan Imam Munandar Pekanbaru	16 s.d. 17 September 2016

# Laporan Tahunan | 2016

		Drs. Abd. Jabbar Hmd, S.H. Drs. Asyari, M.H. Azwir, S.H. Hj. Henny Musyarrofah, S.H., M.H.		
06	Peluncuran Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung R.I.	Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum	Balairung Gedung Mahkamah Agung R.I Jl. Medan Merdeka Utara Jakarta	28 s.d. 30 September 2016
07	Sosialisasi Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung R.I.	Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum Fakhriadi, S.H. Doni, S.Hi	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	27 Oktober 2016
08	Diklat Sertifikasi Ekonomi Syariah	Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum	Balitbang Diklat kumdil Mahkamah Agung R. I. Mega Mendung – Bogor	07 s.d. 22 November 2016
09	Sosialisasi Pembentukan Kelompok Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Tahun 2016	Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum	Emerald Ballroom Kyriad Pesonna Hotel, Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru	27 s.d. 29 November 2016

Tabel III.12: Data Diklat, Pelatihan Dan Bimbingan Pegawai Non Teknis

No	Pelatihan		Penyelenggaraan	
	Nama	Peserta	Tempat	Tanggal
1	2	3	4	5
01	Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015	Dedy Aprianto, S.T. Hendra Susila	Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Pekanbaru	28 Januari 2016
02	Sosialisasi Evaluasi Anggaran 2015 dan Rencana Anggaran 2016	Hj. Henny Musyarrofah, S.H., M.H. Hendra Susila	Ballroom Hotel Aryaduta Pekanbaru	08 Maret 2016

# Laporan Tahunan | 2016

03	Sosialisasi Penyetoran Pajak Secara Elektronik Melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPNG2)	Rina Ramadani, S.E., M.H.	Kanwil DJP Riau & Kepri Jl. Jendral Sudirman 247 Pekanbaru	06 April 2016
04	Bimbingan Teknis LPJ Bendahara	Rina Ramadani, S.E., M.H.	Ruang Mini TLC (Treasury Learning Center) KPPN Pekanbaru	07 April 2016
05	Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 11 Tahun 2016	Hj. Erniati, S.H. Rina Ramadani, S.E., M.H.	Hotel Pangeran Jl. Jenderal Sudirman Pekanbaru	12 April 2016
06	Diklat Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahun 2016	Hj. Erniati, S.H.	Balai Kesehatan Batam, Jalan Marina City, Tj. Uncang, Batu Aji Batam	24 s.d. 29 April 2016
07	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Elpitria, S.Hi., M.H.	PTA Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman 198 Pekanbaru.	28 April 2016
08	Sosialisasi MPNG2	Hj. Henny Musyarrofah, S.H., M.H.	Hotel Aryaduta Jl. Diponegoro Pekanbaru	23 Juni 2016
09	Pemutakhiran data tenaga teknis dilingkungan Pengadilan Agama tahun 2016	Anita Febrina, S.E.	PTA Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman 198 Pekanbaru	27 s.d. 29 Juli 2016
10	Sosialisasi Pedoman / Peraturan Akuntansi Berbasis Akrual Tahun 2016	Farhany Adil, S.H. Hendra Susila	Aula Kanwil Ditjen PBN Pekanbaru	18 Agustus 2016
11	Pendalaman materi aplikasi SAS Versi 16.0.6 mengenai Tata Cara Pengisian Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN)	Rina Ramadani, S.E., M.H. Hendra Susila	Ruang Mini TLC (Treasury Learning Center) KPPN Pekanbaru	19 Agustus 2016
12	Monitoring & Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan	Farhany Adil, S.H. Hendra Susila	PTA Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman 198	5 s.d. 6 September 2016

	Keuangan Berbasis Akrual Satuan Kerja		Pekanbaru.	
13	Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	Hj. Henny Musyarrofah, S.H., M.H. Hendra Susila	Grand Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru	01 November 2016
14	Sosialisasi langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2016	Rina Ramadani, S.E., M.H. Hendra Susila	Ballroom Hotel Aryaduta Jl. Diponegoro Pekanbaru	09 November 2016
15	Monitoring dan Evaluasi ULP/LPSE Mahkamah Agung R.I. Wilayah Peradilan Pekanbaru	Hj. Henny Musyarrofah, S.H., M.H. Sutikno Hady, S.H. Sugeng, S.Kom	PTA Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman 198 Pekanbaru	10 November 2016
16	Sosialisasi Telaah Laporan Keuangan dan Review E-Rekon LK untuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah	Dedy Aprianto, S.T. Hendra Susila	Aula Kanwil Ditjen PBN Pekanbaru. Jl. Jend. Sudirman No. 249 Pekanbaru	24 November 2016

Tabel III.13: Daftar Mutasi di Pengadilan Agama Pekanbaru

No.	Nama	Mutasi dan Rotasi		T.M.T.
		Jabatan Lama	Jabatan Baru	
01	Azwir, S.H.	Panitera Pengadilan Agama Pasir Pangaraian Klas II	Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	08-01-2016
02	Fakhriadi, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	08-01-2016
03	Drs. H. Andi M. Akil, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Subang Klas I.A	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	01-02-2016
04	Dra. Ilfa Susanti, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Jambi Klas I.A	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	01-02-2016

# Laporan Tahunan | 2016

05	Drs. Abd. Gani, M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Sampit Klas II	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	01-02-2016
06	Erdanita, S.Ag	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Klas II	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	01-02-2016
07	Fadlul Akyar, S.H.	Fungsional Umum Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	Fungsional Umum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	01-02-2016
08	Erizon	Fungsional Umum Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	Fungsional Umum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	01-02-2016
09	Dra. Hj. Noviarni, S.H., M.A.	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	Hakim Pengadilan Agama Padang Klas I.A	03-02-2016
10	Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	Hakim Pengadilan Agama Indramayu Klas I.A	05-02-2016
11	Drs. Asyari, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Batam Klas I.B	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	14-03-2016
12	Drs. Muh. Husein Saleh, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	Ketua Pengadilan Agama Kendari Klas I.A	16-03-2016
13	Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A.	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	Hakim Pengadilan Agama Bandung Klas I.A	24-03-2016
14	Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	Hakim Pengadilan Agama Medan Klas I.A	19-09-2016
15	Drs. H. M. Yusar, M.H.	Ketua Pengadilan Agama Watampone Klas I.A	Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	26-09-2016

# Laporan Tahunan | 2016

16	H. Abd. Rahim, S.H.	Hakim Pengadilan Agama Medan Klas I.A	Hakim Agama Pekanbaru Klas I.A	26-09-2016
17	Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Jambi Klas I.A	Hakim Agama Pekanbaru Klas I.A	26-09-2016
18	Drs. Ali Amran, S.H.	Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Klas I.B	Hakim Agama Pekanbaru Klas I.A	26-09-2016
19	Drs. Sy. Effendi Siregar, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Medan Klas I.A	Hakim Agama Pekanbaru Klas I.A	26-09-2016
20	Drs. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Padang Klas I.A	Hakim Agama Pekanbaru Klas I.A	26-09-2016
21	Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Jambi Klas I.A	Hakim Agama Pekanbaru Klas I.A	26-09-2016
22	Drs. Sayuti, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Situbondo Klas I.B	Hakim Agama Pekanbaru Klas I.A	26-09-2016
23	Drs. H. Zainy Usman, S.H.	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh Klas I.A	29-09-2016
24	Burhanuddin, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Klas II	11-10-2016
25	Hj. Umi Salmah, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	13-10-2016
26	Zulfitri, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Klas II	31-10-2016

27	Drs. Zulkifli, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A	Panitera Pengadilan Agama Bengkalis Klas II	31-10-2016
----	---------------------------	--	---	------------

### 5. Kenaikan Pangkat

Tabel III.14: Daftar Kenaikan Pangkat Reguler per April 2016

No	Nama	Pangkat/Golongan Lama	Pangkat/Golongan Baru	Keterangan
1	2	3	4	5
01	Drs. Muh. Husein Saleh, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama Madya (IV/d)	
02	Drs. Abd. Gani, M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	Pembina Utama Muda (IV/c)	
03	Hj. Henny Musyarrofah, S.H., M.H.	Penata Tk. I (III/d)	Pembina (IV/a)	
04	Zahniar, S.H.	Penata (III/c)	Penata Tk. I (III/d)	
05	Erdanita, S.Ag	Penata (III/c)	Penata Tk. I (III/d)	
06	Khairul Anuar, S.H.	Penata (III/c)	Penata Tk. I (III/d)	
07	Hj. Erniati, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata (III/c)	
08	Sutikno Hady, S.H.	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk. I (III/b)	

Tabel III.15: Daftar Kenaikan Pangkat Dalam Jabatan per April 2016

No	Nama	Pangkat/Golongan Lama	Pangkat/Golongan Baru	Keterangan
1	2	3	4	5
01	Azwir, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	Pembina (IV/a)	

Tabel III.16: Daftar kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah per April 2016

No	Nama	Pangkat/Golongan Lama	Pangkat/Golongan Baru	Keterangan

1	2	3	4	5
01	Sugeng, S. Kom	Pengatur Tk. I (II/d)	Penata Muda (III/a)	
02	Sri Yunidarti, S.H.	Pengatur (II/c)	Penata Muda (III/a)	

Tabel III.17: Daftar Kenaikan Pangkat Reguler per Oktober 2016

No	Nama	Pangkat/Golongan Lama	Pangkat/Golongan Baru	Keterangan
1	2	3	4	5
01	Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama Madya (IV/d)	
02	Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	Pembina Utama Muda (IV/c)	
03	Liza Fajriati Hutabarat, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata (III/c)	

Tabel III.18: Daftar Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2016

No.	Nama	Gol.	Jabatan	TMT
1	.2	3	4	5
01	Drs. H. Asril, M.H.	IV/a	Wakil Panitera	01-02-2016
02	Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum	IV/c	Hakim	01-03-2016
03	Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.	IV/b	Hakim	01-03-2016
04	Hj. Henny Musyarrofah, S.H., M.H.	III/d	Sekretaris	01-03-2016
05	Zulfahmi, S.Ag., M.H.	IV/a	Panitera Pengganti	01-03-2016
06	Hj. Yenni, S.H.	III/d	Panitera Pengganti	01-03-2016
07	Drs. H. M. Nasir, As, S.H.	III/d	Panitera Pengganti	01-03-2016
08	Drs. Zulkifli, S.H., M.H.	III/d	Panitera Pengganti	01-03-2016
09	Akhyar, S.H.	III/c	Panitera Pengganti	01-03-2016
10	Fadlul Akyar, S.H.	III/d	Fungsional Umum	01-03-2016
11	Khairul Anuar, S.H.	III/c	Jurusita	01-03-2016

12	Almisri	III/b	Jurusita Pengganti	01-03-2016
13	Hidayah	III/a	Jurusita Pengganti	01-03-2016
14	Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A.	IV/d	Hakim	01-04-2016
15	Anita Febrina, S.E.	III/c	Kasubbag Kepegawaian Ortala	01-04-2016
16	Rina Ramadani, S.E., M.H	III/c	Bendahara Pengeluaran	01-04-2016
17	Liza Fajriati Hutabarat, S.H.	III/b	Panitera Pengganti	01-05-2016
18	Sugeng, S. Kom	II/d	Jurusita Pengganti	01-05-2016
19	Sutikno Hady, S.H.	III/a	Jurusita	01-09-2016
20	Aguslim	III/b	Jurusita	01-10-2016
21	Amir Luffi Zainuddin	II/b	Fungsional Umum	01-10-2016
22	Zahniar, S.H.	II/b	Panitera Muda Gugatan	01-12-2016
23	Burhanuddin, S.H., M.H.	III/d	Panitera Pengganti	01-12-2016

#### 6. Penghargaan Satya Lencana

Pada tahun 2016 pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Pekanbaru yang menerima penghargaan Satya Lencana sebanyak 14 (empat belas) orang yang tergambar sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.19: Daftar Jumlah Pegawai yang Menerima Satya Lencana

No	Jenis Penghargaan	Masa Kerja	Jumlah
1.	Satya Karya Sewindu	8 Tahun	3 orang
2.	Satya Karya Dwi Windu	16 Tahun	4 orang
3.	Satya Lencana Karya Satya X Tahun	10 Tahun	- orang
4.	Satya Lencana Karya Satya XX Tahun	20 Tahun	4 orang
5.	Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun	30 Tahun	3 orang
Jumlah			14 orang

Tabel III.20: Daftar Pegawai yang Menerima Satya Lencana

N o.	Nama Penerima Penghargaan	Pangkat/ Golongan	Masa Kerja	Jenis Penghargaan
1	2	3	4	5
1	H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H	Pembina Utama Muda (IV/c)	34 Tahun 09 Bulan	Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun
2	Drs. H. Muhammad Dj	Pembina Utama Madya (IV/d)	31 Tahun 10 Bulan	Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun
3	Drs. H. Andi M. Akil, M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	32 Tahun 09 Bulan	Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun
4	Drs. H. Syaifuddin, S.H., M. Hum	Pembina Utama Muda (IV/c)	25 Tahun 09 Bulan	Satya Lencana Karya Satya XX Tahun
5	Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum	Pembina Utama Muda (IV/c)	28 Tahun 09 Bulan	Satya Lencana Karya Satya XX Tahun
6	Dra. Hj. Detwati, M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	23 Tahun 09 Bulan	Satya Lencana Karya Satya XX Tahun
7	Drs. Abd. Gani, M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	24 Tahun 09 Bulan	Satya Lencana Karya Satya XX Tahun
8	Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.	Pembina (IV/a)	19 Tahun 09 Bulan	Satya Karya Dwiwindu
9	Hidayati, S.Ag	Penata Tk. I (III/d)	19 Tahun 09 Bulan	Satya Karya Dwiwindu
10	Drs. Zulkfli, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	17 Tahun 09 Bulan	Satya Karya Dwiwindu
11	Efendi, S.Ag	Penata Tk. I (III/d)	19 Tahun 09 Bulan	Satya Karya Dwiwindu
12	Erdanita, S.Ag	Penata Tk. I (III/d)	13 Tahun 00 Bulan	Satya Karya Sewindu
13	Liza Fajriati Hutabarat, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	08 Tahun 07 Bulan	Satya Karya Sewindu
14	Sugeng, S. Kom	Penata Muda	06 Tahun	Satya Karya

		(III/a)	07 Bulan	Sewindu
--	--	---------	----------	---------

## 7. Pensiun

Untuk Tahun 2016, Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengajukan usulan pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun sebagai berikut:

Tabel III.21: Daftar Pegawai yang Mencapai Batas Usia Pensiun

N o	Nama/NIP.	Pangkat/ golongan	Jabatan	T.M.T. Pensiun	Keterangan
1	Drs. H. Abd. Jabbar, HMD, S.H. NIP. 195112121981031006	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim	31-12-2016	SK pensiun belum realisasi, yang sudah diterima adalah SK Presiden R.I. No. 88/P Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Hakim

## B. Keadaan Perkara

### 1. Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru

Dilihat dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2016 bergerak menurun bila dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yang setiap tahunnya bergerak naik, tetapi dari segi keadaan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini terlihat, setidaknya lima tahun terakhir, yaitu tahun 2012 sejumlah 1465 perkara, tahun 2013 sejumlah 1621 perkara, tahun 2014 sejumlah 1714 perkara, tahun 2015 sejumlah 1861 perkara dan tahun 2016 sejumlah 1889 perkara. Mengalami kenaikan sebanyak 28 perkara, tetapi tidak sebanding dengan kenaikan perkara gaib dari 82 tahun 2015 menjadi 121 pada tahun 2016 dan perkara dua minggu terakhir Desember dari 59 pada tahun 2015 menjadi 94 pada tahun 2016. Dan perkara PP.10 sejak bulan Juli hingga Desember 2015 berjumlah 59 perkara, sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 89 perkara. Tiga hal ini sangat mempengaruhi terhadap penyelesaian perkara pada tahun 2016. Dilihat dari

sisa perkara tahun 2015 yang berjumlah 255 perkara, maka perkara pengumuman sejak bulan September hingga Desember 2015 berjumlah 82 dan dua minggu terakhir Desember 2015 berjumlah 59 perkara, sedangkan pada tahun 2016 dengan sisa berjumlah 278 perkara, dengan rincian perkara pengumuman sejak September hingga Desember 2016 berjumlah 121 perkara dan ditambah 94 perkara yang diterima pertengahan hingga akhir bulan Desember 2016 dan 19 perkara PP 10. Tiga komponen perkara tersebut merupakan penyumbang sisa absolut perkara pada tahun 2016 yang tidak dapat ditemukan jalan keluarnya yang dalam laporan ini disebut sebagai hambatan regulasi. Dengan demikian perkara yang tidak dapat diputus pada tahun 2016 karena hambatan regulasi adalah 234 perkara atau 10,91%. Dengan demikian, sisa perkara Pengadilan Agama Pekanbaru yang sesungguhnya pada tahun 2016 adalah 44 perkara (2,05%). Tetapi kalau sisi perkara pada tahun 2016 tanpa melihat penyebab mengapa tidak dapat diputus, maka tingkat penyelesaian perkara adalah 87,03% atau 1866 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2016 adalah 12,97% atau 278.

#### **a. Perkara diterima tahun 2016**

Adapun perkara yang diterima dan diputus serta perbandingan perkara yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2016 ditambah sisa tahun 2015 dan perkara lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel III.22: Jenis Perkara Diterima Tahun 2016

No	Jenis Perakara	Perkara diterima												Jumlah	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	November	Desember		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A. Perkawinan	1	Izin Poligami		2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	5	Kelalaian Kewajiban Suami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Cerai Talak	43	34	41	35	51	22	33	43	29	36	33	34	434
	7	Cerai Gugat	112	124	99	101	99	62	83	131	101	132	122	93	1259
	8	Harta Bersama	2	2	2	1	2	2	2	2	1	0	2	1	19

	9	Hadhonah	-	-	2	2	1	3	1	2	0	1	0	3	15
	10	Nafkah Anak oleh Ibu	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11	Hak-hak Bekas Isteri	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	12	Pengesahan Anak	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	Pencabutan kekuasaan Orang tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14	Perwalian	-	2	1		-	1	-	2	-	4	1		11
	15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16	Orang lain sebagai wali	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17	Ganti rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18	Asal Usul Anak	-		-	-	-		-		-	-	-	-	
	19	Penolakan Kawin Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20	Isbat Nikah	2	1	5	1	2	3	1	4	1	0	2	1	23
	21	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22	Dispensasi Kawin	1	-	-		2			-	1	0		-	4
	23	Wali Adhal	1				-	2	-	3	1	1	1	-	8
B	24	Ekonomi Syari'ah		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
C	25	Kewarisan	3		3		2	1		2	1	2	2	2	18
D	26	Wasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E	27	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	28	Penetapan Ahli Waris	7	1	12	6	10	3	4	8	4	4	11	12	82
G	29	Wali Pengampu	-		2	-	-	-		--	-	-	-	-	2
H	30	Perubahan Biodata				-			-			-	-	-	
	31	Pengangkatan Anak		2				1			1			1	5
I	32	Daden Verzet	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	33	Perlawan Sita Eksekusi	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Jumlah															1889

### b. Perkara diterima dan diputus ahun 2016

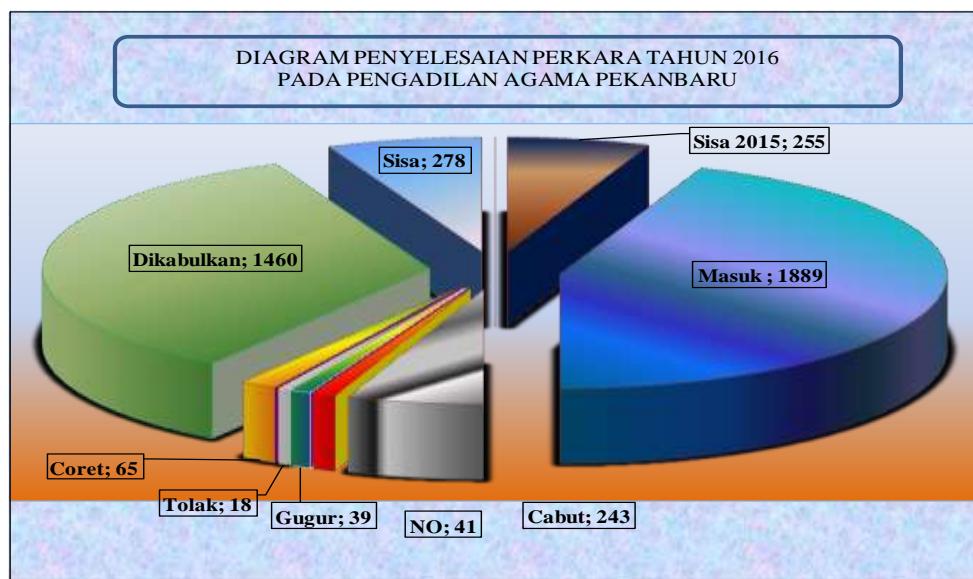
Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2016 adalah 1889 dan sisa perkara tahun 2015 berjumlah 255 perkara dengan demikian jumlah perkara seluruhnya pada tahun 2016 adalah 2144 dan dari jumlah tersebut 1866 diantaranya diputus, sedangkan 278 menjadi perkara tahun 2016 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.23: Jenis Perkara yang Diterima dan Diputus Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Perkara Terima				Perkara putus						Sisa akhir Tahun	
		Sisa th lalu	Terima th ini	Jumlah	Dicabut	Tdk Terima	Digugurka n	Ditolak	Dicoret	Dikabulkan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Perkawinan	1	Izin Poligami	-	3	3	-	-	1	-	-	2	3	0
	2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Pembatalan Perkawinan	-	2	2		-	-	-	-	2	2	0
	5	Kelalaian Kewajiban Suami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Cerai Talak	58	434	492	43	4	11	5	22	346	431	61
	7	Cerai Gugat	177	1259	1436	153	18	25	11	36	1004	1247	189
	8	Harta Bersama	4	19	23	8	3			3	7	21	2
	9	Hadhonah	2	15	17	4	1		1		8	14	3
	10	Nafkah Anak oleh Ibu	-			-		-	-	-			
	11	Hak-hak Bekas Isteri	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	0
	12	Pengesahan Anak /											
	13	Pencabutan kekuasaan Orangtua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Perwalian	1	11	12	1	3	-	-	-	7	11	1
	15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	Orang lain sebagai wali	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	17	Ganti rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	Asal Usul Anak	-				-	-	-	-			
	19	Penolakan Kawin Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	Isbat Nikah	2	23	25	5	1	1	-	1	16	24	1
	21	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	Dispensasi Kawin	-	4	4	1	-	-	-	1	2	4	0
	23	Wali Adhal	1	8	9	4		-	-	-	5	9	0
B	24	Ekonomi Syari'ah	-	2	2		1	-	-	-	-	1	1
C	25	Kewarisan	5	18	23	4	4	-	-	-	7	15	8
D	26	Wasiat	-	1	1	-	-	-	-	-	-	0	1
E	27	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	28	Penetapan Ahli Waris	5	82	87	20	5	1	1	2	47	76	11
G	29	Wali Pengampu		2	2	-	-	-	-	-	2	2	0

H	30	Perubahan Biodata	-			-	-	-	-	-			
	31	Pengangkatan Anak		5	5		1				4	5	0
	32	Daden Verzet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33	Perlawan Sita Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			255	1889	2144	243	41	39	18	65	1460	1866	278

Diagram Penyelesaian Perkara Tahun 2016



### c. Perkara diputus dan diminutasi tahun 2016

Dalam standar mutu yang ditetapkan pada Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa semua perkara yang telah putus tahun 2016 harus sudah diminutasi, sedangkan untuk bulan berjalan perkara yang putus sudah diminutasi paling lambat 6 hari setelah diputus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.24: Perkara Diputus dan Minutasi Tahun 2016

No	Bulan	Putus	Minutasi		Jumlah Minutasi	Ket
			Bulan Berjalan	Bulan Berikut		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
01	Januari	136	131		131	
02	Februari	148	144	5	149	
03	Maret	179	166	4	170	
04	April	151	132	13	145	
05	Mei	161	124	19	143	
06	Juni	149	149	37	186	
07	Juli	91	74	0	74	
08	Agustus	171	144	17	161	

<b>09</b>	September	132	122	27	149	
<b>10</b>	Oktober	169	141	10	151	
<b>11</b>	November	185	150	28	178	
<b>12</b>	Desember	194	194	35	229	
	Jumlah	1866	1671	195	1866	

#### d. Perkara diterima dan diputus lima tahun terakhir (2012 s.d. 2016)

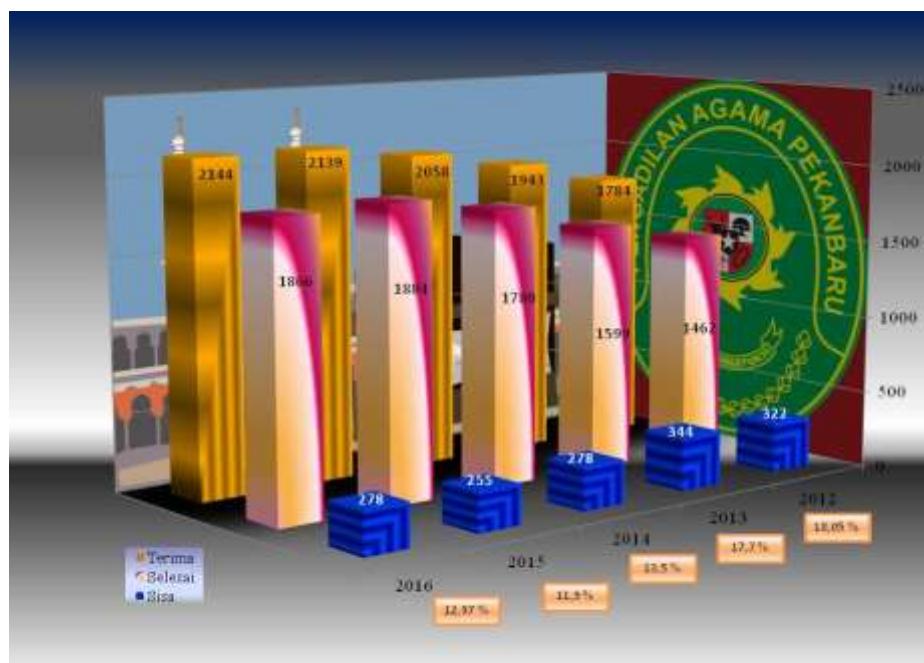
Perkara yang diterima dari tahun ke tahun terus meningkat setidaknya dapat dilihat perkembangan perkara lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel III. 25: Perkara yang diterima dan diselesaikan selama 5 tahun terakhir

No	Tahun	Sisa tahun lalu	Diterima	Jumlah	Diputus	Sisa
01	2012	319	1465	1784	1462	322
02	2013	322	1621	1943	1599	344
03	2014	344	1714	2058	1780	278
04	2015	278	1861	2139	1884	255
05	2016	255	1889	2144	1886	278

Dari data yang disajikan di atas, berikut ini dapat dilihat grafik perkara yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru lima tahun terakhir sebagai berikut:

Grafik:



#### e. Eksekusi

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Pekanbaru menerima permohonan eksekusi 6 (enam) perkara atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang pembagian Harta Bersama, Hadhanah sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.26: Data Perkara Eksekusi 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Terima	Jumlah	Terlaksana
1	2012	-	2	2	2
2	2013	-	12	12	10
3	2014	2	9	11	11
4	2015	-	24	24	11
5	2016	13	6	19	9

Sisa Tahun 2016 10 Perkara

#### f. Mediasi Perkara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menghendaki setiap perkara yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru harus melalui proses mediasi kecuali perkara yang dikecualikan dari mediasi. Mediasi dilakukan oleh Mediator Hakim sama ada mediator Hakim bersertifikat atau Non Hakim Non bersertifikat maupun Mediator Hakim. Dari 1889 perkara yang diterima pada tahun 2016, 1355 (seribu tiga ratus lima puluh lima) dikecualikan dari mediasi dan 534 (lima ratus tiga puluh empat) perkara dilakukan mediasi dan yang berhasil berjumlah 21 (dua puluh satu) dan 495 (empat ratus sembilan puluh lima) tidak berhasil, sedangkan 52 (lima puluh dua) perkara dalam proses, lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.27: Data Perkara yang Dimediasi pada Tahun 2016.

No	Bulan	Perkara			Mediasi		
		Jumlah	Dikecualikan dari Mediasi	Dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
01	02	03	04	05	06	07	08
1	Januari	171	136	35	2	28	5
2	Februari	168	117	51	1	54	1
3	Maret	167	129	38	0	37	2
4	April	148	113	35	2	35	0

5	Mei	171	120	51	1	50	0
6	Juni	100	73	27	1	23	3
7	Juli	124	97	27	0	20	10
8	Agustus	197	167	30	3	33	4
9	September	140	82	58	4	52	6
10	Okttober	180	130	50	1	50	5
11	Nopember	175	108	67	3	59	11
12	Desember	148	83	65	3	54	8
Jumlah		1889	1355	534	21	<b>495</b>	52

## 2. *Access to Justice* bagi Masyarakat Miskin, Kaum Perempuan dan Kelompok Marjinal.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memberikan layanan bagi pencari keadilan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin, kaum perempuan dan kelompok masyarakat terpinggirkan (masyarakat marjinal) untuk dapat berperkara di Pengadilan secara Cuma-Cuma melalui instrumen hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014. Untuk menindaklanjuti Perma tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai salah satu Pengadilan yang berada di bawah supervisi Mahkamah Agung mewujudkan layanan hukum bagi masyarakat terpinggirkan, perempuan dan tidak mampu dengan alokasi dana dalam DIPA Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel III.28: DIPA 04 *Access to Justice* bagi Masyarakat Miskin, Kaum Perempuan dan Kelompok Marjinal.

No	Uraian	Pagu Dipa				Realisasi		% Sisa	%
		Awal	vol	Revisi	Vol	Dipa	Vo		
1	2	3	4	6	7			9	10
01	Sidang di Luar Gedung	11.250.000	1 Keg	14.130.000	1 Keg	14.100.000	1 Keg	99,79	30.000 0,21
02	Pembebasan biaya perkara	3.7000	10 prk	22.500.000	50	20.580.000	72	91,47	1.920.000 8,53
03	Pos Bantuan Hukum	86.000.000	860	61.920.000	860	61.877.000, -	860	99,93	43.0000 0,07

Dari DIPA 2016 yang tersedia di Pengadilan Agama Pekanbaru terlihat bahwa dana untuk *access to justice* yang tersedia adalah untuk tiga kegiatan, yaitu:

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara bagi masyarakat tidak mampu;
2. Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan;
3. Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan.

Berikut adalah gambaran pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru sepanjang tahun 2016.

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah layanan yang diberikan negara melalui Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap orang yang miskin dari segi ekonomi dengan dukungan dana dengan volume kegiatan yang tersedia dalam DIPA 2016 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.29: Layanan Pembebasan Biaya Perkara

No	Uraian	Pagu DIPA				Realisasi		%	Sisa	%
		Awal	Vol	Revisi	Vol	DIPA	Vol			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Pembebasan biaya perkara	3.7000	10 prk	22.500.000	50	20.580.000	72	91,47	1.920.000	8,53

Tabel III.30: Pos Bantuan Hukum

No	Uraian	Pagu DIPA				Realisasi		%	Sisa	%
		Awal	Vol	Revisi	Vol	DIPA	Vol			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Pos Bantuan Hukum	86.000.000	860	61.920.000	860	61.877.000	860	99,93	43.0000	0,07

Dari dana sebesar Rp. 61.920.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan volume kegiatan 860 jam, maka dana yang terserap adalah Rp. 61.877.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan volume kegiatan 860 jam dan sisa dana Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).

b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Untuk mendekatkan masyarakat kepada pelayanan hukum, Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengadakan sidang di luar gedung pengadilan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan alokasi dana Rp. 14.130.000,- (empat belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi dana dan kegiatan sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel III.31: Sidang di Luar Gedung Pengadilan

No	Uraian	Pagu DIPA				Realisasi		%	Sisa	%
		Awal	Vol	Revisi	Vol	DIPA	Vol			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Sidang di Luar Gedung	11.250.000	1 Keg	14.130.000	1 Keg	14.100.000	1 Keg	99,79	30.000	0,21

### c. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Pekanbaru dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, dimana dalam tahun 2016 telah melayani sebanyak 65 (enam puluh lima) dengan jam layanan selama 860 (delapan ratus enam puluh) jam, perkara dengan dana pada DIPA 04 sebesar Rp. 61.920.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.32: Pos Bantuan Hukum

No	Uraian	Pagu DIPA				Realisasi		%	Sisa	%
		Awal	Vol	Revisi	Vol	DIPA	Vol			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Pos Bantuan Hukum	86.000.000	860	61.920.000	860	61.877.000	860	99,93	43.0000	0,07

Dari dana sebesar Rp. 61.920.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan volume kegiatan 860 jam, maka dana yang terserap adalah Rp. 61.877.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan volume kegiatan 860 jam dan sisa dana Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).

### 3. Layanan Meja Informasi dan Pengaduan

Selama tahun 2016 permintaan layanan informasi yang masuk dari bukan pihak yang berperkara, melalui Meja Informasi Pengadilan Agama Pekanbaru berjumlah 38 permohonan, sedangkan pengaduan tidak ada yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru selama tahun 2016.

Tabel III.33: Layanan Meja Informasi dan Pengaduan.

No	Uraian	Jumlah Layanan		Jumlah yang dilayani
		Pihak berpekerja	Bukan pihak berpekerja	
1	2	3	4	5
1	Layanan Informasi	-	38	38
2	Layanan Pengaduan	-	-	-

Total	-	38	38
-------	---	----	----

#### 4. Keuangan Perkara

Dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan Perkara, maka seluruh satuan kerja Pengadilan berkewajiban melaporkan penerimaan keuangan perkara dan penggunaannya sebagai transparansi dan akuntabilitas publik. Sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 Pengadilan Agama Pekanbaru penerimaan keuangan perkara sebesar Rp. 1.356.376.000,- yang terdiri dari sisa tahun 2015 sebesar Rp. 112.200.800,- dan diterima tahun 2016 sebesar Rp. 1.356.367.500,- sedangkan yang digunakan sebagai biaya proses penyelesaian perkara sebesar Rp. 1.237.906.100,- dan saldo sebesar Rp. 118.461.400,-. Gambaran keuangan perkara tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.34: Data Keuangan Perkara Tahun 2016

No	Bulan	Terima	Keluar	Saldo Akhir Bulan
1	Saldo tahun 2015			112.200.800
2	Januari	110.818.000	87.387.000	135.631.800
3	Februari	88.115.000	97.087.000	126.659.800
4	Maret	94.067.000	99.892.400	120.834.400
5	April	104.103.000	89.147.300	135.790.100
6	Mei	113.558.000	112.374.500	136.973.600
7	Juni	83.907.000	97.955.800	122.924.800
8	Juli	83.264.000	69.211.700	136.977.100
9	Agustus	125.515.000	109.476.700	153.015.400
10	September	93.444.000	102.410.300	144.049.100
11	Oktober	120.425.000	109.849.800	154.624.300
12	Nopember	122.254.500	145.979.400	130.899.400
13	Desember	104.696.200	117.134.200	118.461.400

Jumlah	1.356.376.000	1.237.906.100	24.275.430
--------	---------------	---------------	------------

Tabel III.35: Prosentase Penggunaan Keuangan Perkara Selama Tahun 2016

No.	Jumlah penerimaan dalam rupiah	Jumlah pengeluaran dalam rupiah	%	Saldo	%
1	2	3	4	5	6
1.	1.356.376.000	1.237.906.100	91	118.461.400	9

Tabel III.36: Data Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses

No	Bulan	Terima	Keluar	Saldo Akhir Bulan
1	Saldo tahun 2015			51.350.210
2	Januari	8.100.000	14.819.330	44.630.880
3	Februari	7.900.000	7.636.860	44.894.020
4	Maret	8.050.000	7.233.360	45.710.660
5	April	7.150.000	5.092.650	47.768.010
6	Mei	8.150.000	10.276.130	45.641.880
7	Juni	4.750.000	11.267.420	39.124.460
8	Juli	5.950.000	5.020.040	40.054.420
9	Agustus	9.500.000	14.014.440	35.539.980
10	September	6.450.000,00	10.866.080,00	31.123.900
11	Oktober	8.300.000	6.280.910	33.142.990
12	Nopember	8.300.000	17.034.920	24.408.070
13	Desember	7.250.000	7.382.640	24.275.430
Jumlah		89.850.000	116.924.780	24.275.430

## **1. Putusan Yang diajukan Banding**

Pada tahun 2016 perkara yang diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian diajukan banding oleh para pihak sebanyak 29 perkara, sedangkan sisa perkara banding pada tahun 2016 sebanyak 1 perkara, jumlah perkara banding pada Pengadilan Agama Pekanbaru di tahun 2016 berjumlah sebanyak 30 perkara dan telah diputus 23 perkara dan 1 perkara dicabut, sehingga sisa perkara banding pada tahun 2016 sebanyak 6 perkara.

Tabel III.37: Perkara Banding selama 5 Tahun

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Terima	Jumlah	Putus
1	2012	10	32	42	33
2	2013	9	35	44	29
3	2014	15	31	46	35
4	2015	11	45	56	50
5	2016	6	31	37	22
Sisa Tahun 2016 = 15 Perkara					

## **2. Putusan Yang Diajukan Kasasi**

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang diajukan kasasi sebanyak 15 perkara, sedangkan sisa pada tahun 2015 sebanyak 2 perkara, jumlah perkara kasasi 17 perkara dan telah diputus 8 perkara, sehingga sisa perkara kasasi pada tahun 2016 sebanyak 7 perkara.

Tabel III. 38 : Data Perkara Kasasi 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Sisa tahun Lalu	Terima	Jumlah	Putus
1	2012		15	15	13
2	2013	15	11	26	13
3	2014	13	10	23	10
4	2015	13	11	24	12
5	2016	12	15	27	18

Sisa Tahun 2016 = 9
---------------------

### **3. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali**

Selama dalam tahun 2016 Pengadilan Agama Pekanbaru tidak ada menerima perkara peninjauan kembali dan menerima putusan dari Mahkamah Agung RI.

Tabel III.39: Data Perkara Peninjauan Kembali selama 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Terima	Jumlah	Putus
1	2012	-	1	1	-
2	2013	1	-	1	-
3	2014	1	1	2	-
4	2015	2	-	2	1
5	2016	1	-	1	-

## **C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

### **1. Sarana dan Prasarana Gedung**

Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru dengan luas bangunan 1.440 M<sup>2</sup> yang dibangun dengan dua lantai. Lantai I berukuran 720 M<sup>2</sup> dan lantai II 720 M<sup>2</sup> dan secara normatif telah memenuhi standar/prototype Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah ruang sidang sebanyak 3 (tiga) buah, tetapi dari segi design dan ruangannya belum memadai, karena ruangan yang tersedia belum memenuhi unsur-unsur dalam memberikan layanan, karena hingga bangunan telah selesai dalam tiga tahap, ruangan untuk mediasi yang memadai belum ada. Begitu juga dengan ruangan kounter Bank, Pos Bantuan Hukum, Ruang Humas, Ruang Menyusui dan Aula sebagai tempat rapat.

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Pekanbaru mendapat belanja modal untuk membangun pagar sebagai lanjutan proyek pembangunan pagar yang belum selesai pada tahun 2015, sehingga dengan pembangunan pagar kantor dengan ukuran 66 M X 26 M pada tahun 2016 seluruh pekarangan kantor telah terpagar. Hanya

mengenai halaman kantor masih tersisa ± 525 m<sup>2</sup> pada bagian samping kanan dan kiri kantor belum terpasang conblock.

Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A memiliki 1 (satu) unit rumah jabatan dengan ukuran tanah 274 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 76 m<sup>2</sup> untuk Ketua yang berlokasi di Jalan Kembang Sari Gang Reformasi Nomor 35 Kota Pekanbaru. Pada tahun 2009 rumah dinas tersebut telah dilakukan renovasi untuk garasi mobil dan perbaikan lainnya, namun rumah dinas tersebut tetap tidak layak untuk ditempati oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, karena lokasinya berdekatan dengan rumah kos-kosan dan jalan masuk malalui gang sempit yang menyulitkan kendaraan masuk ke lokasi tersebut, sehingga rumah jabatan tersebut saat ini tidak ada penghuninya.

Disamping gedung kantor Pengadilan Agama Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah Kota Pekanbaru, Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A juga mempunyai gedung yang berlokasi di Jalan Bunga Kertas Nomor 21 Kota Pekanbaru dengan luas tanah 1.000 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 250 m<sup>2</sup> keadaannya sudah rusak berat dan sampai saat ini belum ada anggaran untuk pemeliharaan gedung tersebut.

Selain itu Pengadilan Agama Pekanbaru juga mempunyai Gedung Arsip Pengadilan Agama Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad Pekanbaru yang semula merupakan Gedung Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, periode tahun 2007 – 2014, dengan luas tanah ± 3.000 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2016 tidak ada pemeliharaannya, begitu juga pada tahun 2017, sedangkan Gedung tersebut merupakan Gedung Pengadilan Agama Pekanbaru yang dipergunakan untuk Arsip Perkara, karena kapasitas ruang arsip di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A saat ini tidak memadai lagi untuk arsip perkara yang jumlahnya bertambah terus, sehingga gedung Kantor Pengadilan Agama yang terletak di Rawa Indah tersebut merupakan Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru yang aktif untuk Arsip Perkara.

## 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2016 memiliki Daftar Barang Inventaris sebagai berikut:

Tabel III.40: Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No	Nama Inventaris	Merk/Tipe	Banyak	Keterangan
1	2	3	4	5

<b>TANAH</b>				
1	Tanah Bangunan Rumah Dinas Jln Kembang Sari gang Reformasi	Tanah Persil	274 M2	
2	Tanah Bangunan Kantor Lama Jln. Bunga kertas sukajadi	Tanah Persil	1.000 M2	
3	Tanah Bangunan Kantor Jln. Rawa Indah Arifin Ahmad	Tanah Persil	1.588 M2	
4	Tanah Bangunan Kantor Baru Jln. Parit Indah	Tanah Persil	3.893 M2	
5	Tanah Bangunan Tempat Lainnya Jln Kesadaran Tangkerang labuai	Tanah Persil	844 M2	
6.	Tanah bangunan tempat Lainnya Jln Pembangunan I Sidomulyo Timur	Tanah persil	9542 M2	
<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>				
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	3	
2.	Rumah Negara Gol II Tipa D	-	1	
<b>JALAN IRIGASI DAN JARINGAN</b>				
1	Bangunan Jembatan	Beton	1	
2	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	PLN	3	
<b>MESIN</b>				
1	Mobil Dinas	Nissan Grand Livina	1 unit	
		Nissan Xtrail	1 Unit	Milik Pemko Pekanbaru
		Toyota/Innova	1 unit	
2	Sepeda Motor Dinas	Honda	5 unit	1 Rusak ringan 1 Rusak

				Berat
3	Komputer	PC	26 unit	
4	Mesin Absensi	Solution-X500	2 unit	1 Rusak berat
5	Lap Top	Compaq	1 unit	Rusak Berat
		Lenovo	5 unit	1 Rusak Ringan
		Toshiba	1 unit	
		HP	1 unit	
		Fujitsu	2 unit	-
6	Printer	Canon HP	16 unit	
7	Touch Screen IT Perkara	Solution X 500	1 unit	
8	Scaner	Canon/Fujitsu	3 unit	
9	Pompa Air	Shimizu	1 unit	
10	Genset	Hartech	1 unit	
11	AC Split	LG	4 unit	
		Mitsubishi	2 unit	
		Sharp	15 Unit	1 Rusak Berat
		Polytron	6 unit	1 Rusak Berat
12	Dispenser	Miyako	7 unit	
13	Kipas Angin	Maspion	8 unit	
14	Telephon	Fleksi/Kabel	1 Buah	
15	CCTV	-	13 Buah	
16	Telephon PABX (Line)	Aiphone	10 Buah	
<b>PERALATAN</b>				
1	Meja Kerja Kayu	1 & ½ Biro	25 unit	
2	Meja Sidang	Jati Ukir	3 Set	
3	Kursi Besi Metal	Futura	50 unit	
4	Lemari Kayu	Kayu	21 unit	
5	Rak Kayu	Kayu	3 unit	
6	Filing Kabinet	Metal	8 unit	
7	Brankas	Galant	2 unit	
8	Locker	Kayu	5 unit	
9	Papan Visual	Fiber/Plastik	2 unit	
10	White Board	Mika	11 unit	
11	Meja Komputer	Kayu/Kaca	7 unit	
12	Bangku Panjang (Bangku tunggu)	Kayu	12 unit	
13	Bangku Para Saksi	Kayu	8 unit	

	(Pesakitan)			
14	Palu Sidang	Kayu	3 Buah	
15	Mimbar Podium	Kayu	1 Unit	
16	Tiang Bendera	Kayu	8 Buah	
17	Lambang Instansi	-	1 Set	
18	Gambar Presiden dan Wapres	Kaca	4 set	
19	Peralatan Tenis Meja	Kayu	1 Set	Rusak Berat
20	Piala	-	13 Buah	
25	Piagam	-	3 Buah	

### 3. Pengelolaan Tata Persuratan

Pengelolaan sistem administrasi umum pada Pengadilan Agama Pekanbaru menggunakan sistem arsip dinamis, mulai dari penerimaan surat-surat masuk maupun surat keluar dengan menggunakan lembaran KK (Kartu Kendali), LP (Lembaran Pengantar) dan LD (lembar disposisi).

Surat yang masuk pada Pengadilan Agama Pekanbaru diolah dua TU Unit Pengolah, yaitu Bagian Kesekretariatan dan Bagian Kepaniteraan yang pemisahannya dilakukan oleh Kasub. Bagian Umum dan Keuangan. Semua surat yang masuk pada bagian kesekretariatan yang pengelolaannya pada bagian Kepaniteraan TU Unit Pengolahnya adalah Panmud Hukum, sedangkan pada Bagian Kesekretariatan TU Unit Pengolahnya adalah Bagian Umum dan Keuangan.

Pada tahun 2016 ini, surat yang diproses pada Pengadilan Agama Pekanbaru berjumlah 10.772 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat masuk sebanyak 3.203 buah.
- b. Surat keluar sebanyak 7.569 buah.

### 4. Pengelolaan Perpustakaan.

Perpustakaan Pengadilan Agama Pekanbaru hingga saat ini memiliki koleksi dalam bentuk buku 563 judul yang dikelola dengan menggunakan Sistem Dewey Decimal Classification (DDC). Buku perpustakaan pada Pengadilan Agama Pekanbaru yang berjumlah 563 judul tersebut diklasifikasikan kepada dua, yaitu Referensi dan Non Fiksi. Selain dilihat dari klasifikasinya, Buku Perpustakaan tersebut dikelompokkan kepada beberapa subyek, yaitu Umum, Filsafat, Agama yang terdiri dari subyek Tafsir, Hadis, Fiqh, Tasauf, Kosmografi atau Ilmu Falak dan

Kesenian. Selain itu untuk subyek 300 juga terdapat Filsafat Hukum, Hukum pada Umumnya dan Hukum Acara serta subyek bahasa.

Dari segi pengolahan bahan pustaka hingga saat ini pengolahannya belum maksimal karena di Pengadilan Agama Pekanbaru belum ada petugas perpustakaan yang status kepegawaiannya sebagai fungsional perpustakaan, sehingga pengelola perpustakaan adalah Jurusita Pengganti yang diperbantukan untuk mengelola perpustakaan. Hal ini mengakibatkan pengolahan bahan perpustakaan dan layanan peminjaman buku dengan pinjam baca tidak dapat berjalan dengan maksimal, karena pada saat petugas pustaka melakukan tugas pokok sebagai Jurusita Pengganti, maka layanan peminjaman tidak dibuka.

## 5. Bidang Kinerja Pelayanan Publik

Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memberikan layanan kepada publik telah mempunyai petugas yang melayani permintaan informasi dan pengaduan serta meja Informasi dan Pengaduan. Pengadaan sarana dan prasarana kinerja pelayanan publik ini merupakan penerapan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik. Terhadap dua peraturan hukum ini, Komisi Informasi telah mengeluarkan dua peraturan, yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Pelayanan Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik. Untuk menindaklanjuti dua undang-undang tersebut di atas oleh Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tanggal 5 Januari 2011. Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W4-A1/134/HM.02.3/I/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I-A tahun 2016 dan Surat Keputusan No. W4-A1/142/HM.02.3/I/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang Penunjukan Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I-A tahun 2016.

Selama tahun 2016, petugas yang ditunjuk memberikan layanan publik dan menerima pengaduan masyarakat atas kinerja yang diberikan Pengadilan Agama Pekanbaru, maka hingga saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru belum pernah menerima laporan pengaduan masyarakat atas kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru,

sedangkan terhadap layanan informasi, Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2016 telah memberikan 38 layanan informasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

#### **D. Pengelolaan Keuangan**

Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2016 memperoleh 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) pagu anggaran setelah Revisi pagu Minus sebesar Rp. 12.745.319.000,- (Dua belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
2. DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) pagu anggaran sebesar Rp. 105.150.000,- (seratus lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Realiasi pagu anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 12.543.768.142,- (dua belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 201.550.858,- (Dua ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 41 : DIPA 01 Badan Urusan Admininstrasi MA.RI

No	Aku n	Uraian	Pagu Dipa		Realisasai	%	Sisa	%	Ket
			Awal	Revisi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	511111	Gaji Pokok PNS	3.108.114.000	3.562.614.000	3.483.727.400	99,79	78.886.600	2,21	
2	521119	Pembulatan	37.000	-	35.522	96,01	1.478	3,99	
3	511121	Blj.Tunj S/I	236.615.000,-	249.115.000,-	248.176.700	99,62	938.300	0,38	
4	511122	Blj.Tunj.An ak	64.197.000	71.697.000	71.426.296	99,62	270.704	0,38	
5	511123	Tunj.Strukt ural	33.800.000	38.300.000	38.160.000	99,63	140.000	0,37	
6	511124	Tunj.Fungs ional	5.805.585.000	4.985.045.000	4.981.015.00	99,92	4.300.000	0,08	

# Laporan Tahunan | 2016

7	511125	Tunj. PPh PNS	1.148.990.000	800.692.000	761.075.661	94,11	47.616.339	5,89	
9	511126	Tunj. Beras	162.792.000	-	160.410.300	98,54	2.381.700	1,46	
10	511129	Uang makan	531.040.000	-	503.552.000	95	27.488.000	5	
11	511151	Tunj.Umu m PNS	23.725.000	-	19.455.000	82,00	4.270.000	18,0 0	
12	511157	Tunj.Kema halan Hakim	226.800.000	345.300.000,-	336.390.000	97,42	8.910.000	2,58	
13	512211	Uang Lembur	42.168.000	-	41.902.000	99,37	266.000	0,63	
	<b>002</b>								
1	524113	Perj.Dlm Kota	1.350.000	-	1.350.000	100	-	0	
2	524111	Perj.Dinas Biasa	20.070.000	-	20.033.800	99,92	36.200	0,18	
3	521211	Kosumsi Rpt	510.000	-	508.250	99,66	1.750	0,34	
4	521111	Keperluan Ktr	324.314.000	358.814.000,-	349.021.025	97,27	9.792.975	2,73	
5	521811	Persediaan brng Kosumsi	90.600.000	-	90.597.888	100	2.112	0,00	
6	521813	Persedian pita cukai	1.050.000	-	1.047.000	99,71	3.000	0,29	
8	521114	Pengiriman surat dinas	4.800.000	12.000.000	11.999.820	100	180	00	
9	522111	Listrik	99.600.000	122.400.000	118.804.938	97,06	3.595.062	2,94	
10	522112	Telepon	6.000.000	4.200.000	2.702.066	64,33	1.497.934	35,6 7	
11	523111	Pemelihara an Gedung	55.200.000	73.680.000	73.679.200	100	800	00	
12	523112	Persediaan Pemelihara an	2.560.000	2.560.000	2.529.000	98,79	31.000	1,21	
13	523119	Pem Gedung lainnya	7.140.000,-	3.500.000	3.455.100	98,72	44.900	1,28	
14	523121	Pemelihara an Peralatan dan Mesin	66.000.000,-	80.300.000	80.257.444	99,95	42.556	0,05	
15	523133	Pemelihara an Jaringan	4.000.000,-	22.190.000	22.178.400	99,95	11.600	0,05	
16	521115	Honor Satuan Kerja	39.000.000,-	35.400.000	35.400.000	100	-	00	
17	521119	Operasional lainnya	7.500.000,-	10.170.000	10.169.950	100	50	00	
	<b>051</b>								
1	532111	Bj.Modal peralatan dan mesin	86.000.000,-	-	85.965.000	99,96	35.000	0,04	
2	533111	Sarana Lingkungan	1.000.000.000,-						
3	532111	Pengadaan AC/Vertica l Blinds		137.200.000	137.099.480	99,93	100.520	0,07	
4	533111	Lingkungan Gedung		862.800.000	859.220.000	99,59	3.580.000	0,41	
		Jumlah	13.198.957.000	12.745.319.000	11.554.402.387	98,42	201.550.858	1,58	

Pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2016 untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik

Indonesia) dengan pagu anggaran tersebut ada 3 (tiga) bagian alokasi dana, sebagai berikut:

**Tabel III.42: Alokasi DIPA 01 (Badan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia)**

No	Akun	Uraian	Pagu DIPA		Keterangan
			Awal	Revisi	
1	51	Belanja Pegawai	11.383.863.000	10.820.525.000	
2	52	Belanja Barang	707.164.000	838.794.000	
3	53	Belanja Modal	1.086.000.000	-	Tidak ada revisi

Selain DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia), pada tahun 2016 Pengadilan Agama Pekanbaru juga mengelola DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) sebagaimana tersebut di bawah ini:

**Tabel III.43: DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)**

No	Uraian	Pagu DIPA				Realisasi		% Sisa	%
		Awal	Vol	Revisi	Vol	DIPA	Vol		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sidang di Luar Gedung	11.250.000	1 Keg	14.130.000	1 Keg	14.100.000	1 Keg	99,79	30.000
2	Pembebasan biaya perkara	3.7000	10 Prk	22.500.000	50 Prk	20.580.000	72 Prk	91,47	1.920.000
3	Pos Bantuan Hukum	86.000.000	860	61.920.000	860	61.877.000	860	99,93	43.0000
									0,07

**Tabel III.44: DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA.RI**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Barang	105.150.000,-	103.155.000	1.995.000	98,10
	Jumlah	105.150.000,-	103.155.000	1.995.000	98,10

Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2016 ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai Koordinator Wilayah Propinsi Riau (0900) DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 1.050.079.000,- (satu miliar lima puluh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) satuan kerja yaitu:

1. Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
3. Pengadilan Agama Bangkinang.
4. Pengadilan Agama Rengat.
5. Pengadilan Agama Tembilahan.
6. Pengadilan Agama Bengkalis.
7. Pengadilan Agama Dumai.
8. Pengadilan Agama Selatpanjang.
9. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
10. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
11. Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

Realisasi Anggaran DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) Koordinator Wilayah Propinsi Riau pada Tahun Anggaran 2016 hingga Desember 2016 sebesar Rp. 1.046.423.000,- (Satu miliar empat puluh enam juta empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.655.200,- (Tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), selengkapnya realisasi anggaran satker Koordinator Wilayah Riau sebagai berikut:

Tabel III.45: Korwil DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Wilayah Propinsi Riau (0900)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi Anggaran %
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Barang	1.050.079.000	1.046.423.000	3.655.200	99
Jumlah		1.050.079.000	1.046.423.000	3.655.200	99

Tabel III.46: Satker Di Korwil Dipa 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) Di Wilayah Propinsi Riau (0900)

No	Satker	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi Anggaran %
1	2	3	4	5	6

1	PA. Pekanbaru	105.150.000,-	103.155.000	1.995.000	98,10
2	PTA. Pekanbaru	218.968.000	218.859.800	108.200	99,95
3	PA. Bangkinang	69.965.000	69.815.000	150.000	99,78
4	PA. Rengat	111.523.000	111.523.000	0	100
5	PA. Tembilahan	67.437.000	67.027.000	410.000	99,39
6	PA. Bengkalis	91.394.000	91.394.000	0	100
7	PA. Dumai	124.390.000	123.960.000	430.000	99
8	PA. Selatpanjang	62.732.000	62.732.000	0	100
9	PA.Psr.Pengaraian	62.710.000	62.546.000	164.000	99,73
10	PA. Pangkalan Kerinci	76.355.000	76.017.000	338.000	99,56
11	PA.UjungTanjung	59.455.000	59.395.000	60.000	99,89
<b>Jumlah</b>		<b>1.050.079.000</b>	<b>1.046.423.800</b>	<b>3.655.200</b>	<b>99</b>

#### E. Dukungan Teknologi Informasi

Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun Anggaran 2016 dalam program kerjanya adalah memberikan layanan kepada pengguna layanan internal dan eksternal dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, sehingga pada Bagian Keperkaraan, sejak dari penerimaan perkara sampai kepada pengiriman salinan putusan kepada KUA Kecamatan sepenuhnya dengan dukungan teknologi informasi, sedangkan pada Bagian Kesekretariatan sebagian besar pengelolaan administrasi masih bersifat manual.

Layanan pada Bagian Keperkaraan yang merupakan layanan kepada penerima layanan eksternal dapat terlaksana dengan sistem aplikasi adalah dengan adanya dukungan dana dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan cara merevisi anggaran internet pada Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2016 yang semula pada DIPA 2016 hanya Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk satu tahun anggaran 2016 menjadi Rp. 85.200.000,- dengan rincian perbulan sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah). Iuran yang demikian besar diperlukan, karena Pengadilan Agama Pekanbaru telah menambah bandwidth internet

**Halaman 59 dari 68 "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2016"**

dari Paket Speedy 3 MB tahun 2015 menjadi Dua Buah Paket Indihome, yaitu Indihome 20 Mb dengan IP Dinamis dan Paket Indihome 10 MB dengan IP Statik dari Provider PT. Telkom Indonesia. Selain dari itu, Pengadilan Agama Pekanbaru juga menambah kapasitas Website Hosting dari yang selama ini 2,5 GB menjadi 5 GB pada tahun 2016. Hal ini diperlukan karena Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mengelola perkara menjalankan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan versi terkini, yaitu versi 3.1.4 dengan catatan bahwa SIPP Lokal dan SIPP Web menggunakan sistem operasi server open source CentOS linux. SIPP Web Pengadilan Agama Pekanbaru menggunakan server lokal untuk memudahkan sinkronisasi data dari SIPP Lokal ke SIPP Web sehingga menyajikan informasi lebih cepat dan realtime dan untuk akses publik SIPP Web menggunakan IP Publik Statik dari paket indihome IP Statik yang dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga SIPP Web yang berada di server lokal dapat diakses di jaringan internet dengan alamat tetap.

Pada kenyataannya, hingga saat ini menu dan template yang terdapat pada SIPP masih belum dapat menjawab kebutuhan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karena itu Pengadilan Agama Pekanbaru menerapkan dual application system, yaitu SIPP secara utuh dan SIADPA PLUS. Dengan penambahan bandwidth tersebut, maka demi meningkatkan layanan kepada penerima layanan eksternal, Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memberikan layanan memakai sistem antrian, Aplikasi Antrian Sidang dan Aplikasi SMS GATEWAY yang berbasis SIADPA PLUS dan Aplikasi Barcode Penelusuran Perkara Berbasis Quick Response Code (QR CODE) yang berbasis SIPP serta Aplikasi CCTV Viewer Android dan Personal Computer (PC) untuk media pengawasan didalam dan luar gedung pengadilan oleh pimpinan.

Selain dari itu, penambahan web hosting dan bandwidth internet Pengadilan Agama Pekanbaru juga tidak hanya bermanfaat kepada layanan eksternal, tetapi juga pada layanan internal seperti pengiriman data pegawai yang akan naik pangkat dengan sistem paper less, SIKEP/ABS Sikep dan Komdanras serta semua aplikasi yang berbasis teknologi informasi dalam mengelola keuangan, seperti SIMAN, SIRUP dan aplikasi lainnya.

## F. Regulasi Tahun 2016

Regulasi merupakan terminologi yang diartikan sebagai acuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas di Pengadilan Agama Pekanbaru sepanjang tahun 2016. Hal ini mengacu kepada dan merupakan derivasi dari regulasi pengadilan yang di atasnya, yaitu Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai pengadilan yang berada di bawah supervisi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merumuskan regulasi yang sifatnya tidak bertentangan dengan tujuan lembaga peradilan pada umumnya. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan regulasi pada tahun 2016 yang sifatnya mendukung program kerja dan target yang telah ditetapkan dalam rapat kerja Pengadilan Agama Pekanbaru diawal tahun 2016 yang merupakan haluan dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, maka regulasi yang diberlakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sistem manajemen mutu di Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Menetapkan kebijakan mutu dalam melaksanakan layanan untuk melayani penerima layanan internal dan penerima layanan eksternal
3. Merumuskan dan menetapkan bisnis proses dalam setiap layanan di Pengadilan Agama Pekanbaru
4. Merumuskan dan menetapkan standar pelayanan bagi penerima layanan eksternal
5. Mengadakan pengukuran kepuasan penerima layanan atas layanan yang diberikan Pengadilan Agama Pekanbaru
6. Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 dalam memberikan pelayanan kepada penerima layanan eksternal.
7. Setiap pelaksanaan tugas harus berpedoman kepada dokumen eksternal dan dokumen internal

## BAB IV

## PENGAWASAN

Pengawasan atau kontroling merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang harus berjalan secara efektif selama organisasinya masih eksis. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai salah satu satker di lingkungan Pengadilan Agama telah menerapkan manajemen yang disebut dengan Kualiti Sistem Manajemen Plan, Do, Chek dan Action (PDCA). Chek merupakan padanan dari controling yang terdapat dalam fungsi-fungsi manajemen yang dirmuskan oleh G. R. Terry yang banyak dikenal saat membicarakan fungsi-fungsi manajemen pada umumnya. Berkenaan dengan Pengawasan ini dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 080/SK/KMA/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Peradilan, Mahkamah Agung menyebutnya dengan pengawasan internal yang dibagi kepada dua jenis, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Pengawasan dilakukan oleh hakim pada satker masing-masing dan pengawasan fungsional oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung diatur dalam Nomor 80 Tahun 2006, sedangkan pengawasan melekat diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016. Pengawasan merupakan bahagian dari tugas Hakim selaku Hakim Pengawas Bidang, Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang meliputi tugas-tugas pemeriksaan teknis peradilan, pemeriksaan administrasi peradilan dan pemeriksaan administrasi umum dan kinerja pelayanan publik.

### A. Internal

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Pekanbaru selama tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4.A1/203/PS.01/SK/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang selanjutnya diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4.A1/7884/PS.01/SK/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang nama-nama dan bidang pengawasan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel IV.1: Hakim Pengawas Bidang

No	Hakim Pengawas	Bidang Pengawasan	Sub Bidang Pengawasan
1.	Drs. H. M. Yusar, M.H.	Koordinator	-
2.	H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.	Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Prosedur Penerimaan Perkara</li> <li>❖ Register Perkara</li> </ul>
3.	H. Abd. Rahim, S.H.	Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pelaporan Perkara</li> <li>❖ Laporan Penanganan Pengaduan</li> </ul>
4.	Drs. Mardanis, S.H., M.H.	Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Keuangan Perkara</li> </ul>
5.	Drs. H. Abd. Jabbar Hmd, S.H.	Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Keuangan Eksekusi</li> <li>❖ Keuangan Konsinyasi</li> </ul>
6.	Drs. H. Muhammad Dj.	Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ATK Perkara</li> <li>❖ Sisa Panjar Perkara</li> </ul>
7.	Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum	Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kearsipan Perkara</li> <li>❖ Berkas Berjalan</li> </ul>
8.	Drs. Asyari, M.H.	Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mediasi</li> <li>❖ Kinerja Pelayanan Publik</li> </ul>
9.	Drs. H. Andi M. Akil, M.H.	Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemberkasan</li> <li>❖ Berita Acara Sidang</li> </ul>
10.	Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.	Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Meja Informasi</li> </ul>
11.	Drs. Abd. Gani, M.H.	Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PBT</li> <li>❖ Panggilan</li> </ul>
12.	Drs. H. Barmawi, M.H.	Administrasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Minutasi</li> <li>❖ BHT</li> </ul>
13.	Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.	Administrasi Persidangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PMH</li> <li>❖ PJS/PJSP</li> <li>❖ PHS</li> <li>❖ PPP</li> </ul>

14.	Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.	Administrasi Persidangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Panggilan (Tabayun)</li> <li>❖ Berita Acara Sidang (Perkara Berjalan)</li> </ul>
15.	Drs. Sy. Effendi Siregar, M.H.	Administrasi Umum Manajemen Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Manajemen Peradilan</li> <li>❖ Kepegawaian</li> </ul>
16	Drs. Sayuti, M.H.	Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Keuangan DIPA</li> <li>❖ PNBP</li> </ul>
17.	Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.	Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Surat Menyurat</li> <li>❖ Inventaris</li> </ul>
18.	H. Asli Sa'an, S.H.	Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Perpustakaan</li> </ul>
19.	Drs. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.	Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kearsipan</li> </ul>
20.	Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.	Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>
21.	Drs. Ali Amran, S.H.	Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Perencanaan, Pelaporan dan IT</li> </ul>
22.	Drs. Muslim Djamaruddin, M.H.	Kinerja Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ SIADPA Plus/SIPP</li> </ul>
23.	Drs. H. M. Zakaria, M.H.	Kinerja Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ IT</li> <li>❖ Website</li> </ul>
24.	Dra. Hj. Detwati, M.H.	Kinerja Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengiriman salinan putusan/penetapan kepada KUA dan para pihak</li> </ul>

Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Pekanbaru, pengawasan fungsional juga dilakukan oleh Tim Hatibinwasda Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Khusus dari Hatibinwasda Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru , pengawasan dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama pada tanggal 12 s.d. 14 April 2016 dengan Ketua Tim oleh DR. H. Marjohan Syam, S.H., M.H. dan anggota masing-masing Drs. H. Lazuardi, S.H., M.H. dan Said.Abd. Kadir, BA. Kedua pada 16 s.d 17 dengan Ketua Tim Drs. H. Zein Ahsan, M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan anggota masing-masing DR. H. Marjohan Syam, S.H., M.H. dan Said Abd. Kadir, BA, sedangkan dari Badan Pengawasan Halaman 64 dari 68 **"Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2016"**

Mahkamah Agung, berdasarkan Surat Tugas Nomor 542/BP/ST/X/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bertanggal 18 Oktober 2016 melakukan pengawasan dari tanggal 17 Oktober 2016 s.d. tanggal 4 November 2016. Dengan Ketua Tim Imam Purnomo dan Anggota masing-masing Muhammad Adzkiya, Andi Yusuf Sukiman dan Zulfikri Oktiva Lubis.

Selain dari itu, Pengawasan atas perintah Badilag dengan klasifikasi pengawasan karena kasus sesuai dengan Surat Dirjen Badilag Nomor 2065/DJA/KP.02.1/9/IX/2016 tanggal 14 September 2016, dengan Objek Pemeriksaan sdr. H. Asli Saan, S.H pada tanggal 29 September 2016, juga telah dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (HATIBINWASDA) pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Ketua Tim Dr. H. Marjohan Syam, S.H., M.H. dan masing-masing Drs. H. Lazuardi, S.H., M.H. dan Drs. H. Endang Mukhlis, S.H., M.H. serta Yosi, S.Ag. sebagai Sekretaris.

## B. Evaluasi

1. Pengadilan Agama Pekanbaru sudah menindaklanjuti temuan-temuan dan arahan yang disampaikan oleh Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, ada yang menyangkut belanja modal, belanja barang maupun belanja pegawai. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan perkara dan rekening RPL sebagai rekening penampungan pada bagian keperkaraan.
2. Terhadap hasil Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Pekanbaru yang dilaksanakan setiap bulan, maka pada setiap minggu ke empat setiap bulan berjalan di bawah koordinasi Wakil Ketua telah diadakan evaluasi atas hasil tindak lanjut hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang oleh pelaksana tugas yang bersangkutan.
3. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru juga telah ditindak lanjuti yang secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:
  - a. Terhadap hasil pengawasan pada tanggal pada tanggal 12 s.d. 14 April 2016 dengan Ketua Tim oleh DR. H. Marjohan Syam, S.H., M.H. yang pada umumnya menyangkut pelaksanaan hukum acara dan mediasi sesuai

Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah ditindaklanjuti dan menyesuaikan mediasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

- b. Hasil pengawasan pada 16 s.d 17 dengan Ketua Tim Drs. H. Zein Ahsan, M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru belum ditindaklanjuti karena hingga laporan ini selesai dibuat hasil pengawasan tersebut belum diterima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Terhadap hasil pengawasan atas perintah Badilag dengan Surat Dirjen Badilag Nomor 2065/DJA/KP.02.1/9/IX/2016 tanggal 14 September 2016 yang tergolong pemeriksaan kasus, dengan Objek Pemeriksaan sdr. H. Asli Saan, S.H. pada tanggal 29 September 2016 yang oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (HATIBINWASDA) pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Ketua Tim Dr. H. Marjohan Syam, S.H., M.H. yang menghasilkan rekomendasi terhadap terperiksa Pengadilan Agama Pekanbaru tidak ada perintah untuk menindaklanjuti.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Keseimpulan

“Agama Pekanbaru Tahun 2016”

1. Dari segi pelayanan Pengadilan Agama Pekanbaru telah meraih Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dari Badan Sertifikasi Intergrated Assessment Service (IAS) dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 79,40 (Baik), sedangkan dari Indeks Persepsi Masyarakat terhadap pelayanan harian pada Pengadilan Agama Pekanbaru sepanjang tahun 2016 adalah 87,9 % menyatakan puas, dengan rincian 64,74 % puas dan 23,24 % sangat puas, sedangkan sisanya 12,05 % tidak puas.
2. Dilihat dari sisi penyerapan anggaran, pada prinsipnya pelaksanaan program RPA pada tahun 2016 dapat terlaksana dengan baik, ada belanja modal, belanja pegawai maupun belanja barang, hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran rata-rata perakun mencapai 93,40% (sembilan puluh tiga koma empat puluh persen). Dilihat dari aspek kepegawaian, Pengadilan Agama Pekanbaru dinilai berhasil, karena Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Agama di Kendari Kls IA, sedangkan Panitera Muda Permohonan dan dua orang Panitera Pengganti menjadi Panitera di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Khusus mengenai data kepegawaian, pegawai teknis maupun pegawai non teknis telah terekam dalam aplikasi SIKEP/ABS Sikep dan juga semua pegawai telah melewati seluruh tahapan PUPNS.
3. Pada bidang keperkaraan, Pengadilan Agama Pekanbaru telah mendapat penghargaan dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung atas pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pemanggilan Tabayun yang hanya diselesaikan dalam waktu rata-rata 1,48 hari pada masing-masing panggilan, tetapi khusus penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Pekanbaru sedikit mengalami perlambatan sebesar 1,05 %, yaitu 87,03 % bila dibanding pada tahun 2015 yang mencapai 88,08%. Penurunan penyelesaian ini dipicu oleh tingginya perkara gaib empat bulan terakhir yang berjumlah 121 atau setara dengan 43,52 % dari jumlah sisa perkara tahun 2016 dan perkara yang diterima dua minggu terakhir bulan Desember 2016 adalah 94 atau 33,81 %, sedangkan

pada tahun 2015 perkara gaib hanya berjumlah 82 perkara dan perkara dua minggu terakhir bulan Desember berjumlah 59 perkara.

## A. Rekomendasi

1. Hambatan dalam mencapai target penyelesaian perkara 10 % adalah tingginya jumlah perkara gaib yang memerlukan waktu 4 (empat) bulan masa pemanggilannya, sehingga perkara yang masuk pada bulan September sampai dengan Desember sudah dapat dipastikan menjadi sisa, oleh karena itu kami merekomendasikan agar dimasa yang akan datang pemanggilan dalam perkara gaib ditinjau ulang dengan cara pembentukan Peraturan Mahkamah Agung mengenai Hukum Acara Perdata khusus dalam perkara yang tergugatnya tidak diketahui alamatnya, karena dengan teknologi informasi dan alat transportasi yang ada sekarang ini panggilan pengumuman dan menghadiri sidang di Pengadilan yang paling jauh di Indonesia tidak memerlukan waktu satu bulan.
2. Masalah yang tidak kalah pentingnya untuk percepatan penyelesaian perkara adalah mengenai panggilan tabayun yang belum disikapi secara bersama oleh pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu kami merekomendasikan agar di Pengadilan Tingkat Banding dan di Badilag ada petugas khusus yang memantau efektivitas panggilan Tabayun ini.